

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) dan untuk periode enam bulan
yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2023
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(TIDAK DIAUDIT)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3-4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5-110

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30 Juni 2023
dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak diaudit)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ririek Adriansyah
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Karang Tengah Raya Pertanian I/99 RT 05 RW 04
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Heri Supriadi
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Rancamayar No. 18 RT 001 RW 008
Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal, Bandung
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ (021) 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anak tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, **28** Juli 2023



Ririek Adriansyah
Direktur Utama

Heri Supriadi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2022 (diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas - bersih	3,32,37	40.521	31.947
Aset keuangan lancar lainnya - bersih	4,32,37	1.402	1.349
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian			
Pihak berelasi	5,32,37	1.763	1.620
Pihak ketiga	5,37	8.388	7.014
Aset kontrak - bersih	6,32,37	2.249	2.457
Piutang lain-lain - bersih	37	1.419	245
Persediaan - bersih	7	1.118	1.144
Aset tersedia untuk dijual	11b	6	6
Biaya kontrak	9	697	671
Pajak dibayar di muka	27a	2.359	1.464
Tagihan restitusi pajak	27b	3	380
Aset lancar lainnya	8,32	5.965	6.760
Jumlah Aset Lancar		<u>65.890</u>	<u>55.057</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset kontrak - bersih	6,32,37	110	34
Investasi jangka panjang	10,37	9.218	8.653
Biaya kontrak	9	1.973	1.741
Aset tetap	11,32,35a	175.471	173.329
Aset hak-guna	12	20.673	20.336
Aset takberwujud	14	8.105	8.302
Aset pajak tangguhan - bersih	27f	4.005	4.117
Aset tidak lancar lainnya	13,27,32,37	5.033	3.623
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>224.588</u>	<u>220.135</u>
JUMLAH ASET		<u>290.478</u>	<u>275.192</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	15,32,37	533	431
Pihak ketiga	15,37	14.837	18.026
Liabilitas kontrak	17a,32	7.189	6.295
Utang lain-lain	37	16.075	463
Utang pajak	27c	5.563	5.372
Beban yang masih harus dibayar	16,32,37	13.717	15.445
Deposit pada pelanggan	32	2.846	2.382
Utang bank jangka pendek	18a,32,37	15.129	8.191
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	18b,32,37	14.226	8.858
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	12,37	5.235	4.925
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>95.350</u>	<u>70.388</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	27f	1.029	1.023
Liabilitas kontrak	17b,32	1.464	1.561
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	31	1.111	1.031
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	30	11.142	10.272
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	19,32,37	26.503	27.331
Liabilitas sewa	12,37	13.257	13.736
Liabilitas lainnya		271	588
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>54.777</u>	<u>55.542</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>150.127</u>	<u>125.930</u>
EKUITAS			
Modal saham	21	4.953	4.953
Tambahan modal disetor		2.711	2.711
Komponen ekuitas lainnya	22	9.558	9.697
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	29	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		91.286	96.560
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		123.845	129.258
Kepentingan nonpengendali	20	16.506	20.004
JUMLAH EKUITAS		<u>140.351</u>	<u>149.262</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>290.478</u>	<u>275.192</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PENDAPATAN	23,32	73.478	71.983
BIAYA DAN BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	25,32	(19.170)	(17.847)
Beban penyusutan dan amortisasi	11,12,14	(15.948)	(16.986)
Beban karyawan	24	(7.844)	(7.526)
Beban umum dan administrasi	26,32	(3.331)	(2.820)
Beban interkoneksi	32	(3.093)	(2.647)
Beban pemasaran	32	(1.656)	(1.696)
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi	10	412	294
Penghasilan lain-lain - bersih		283	57
(Rugi) laba selisih kurs - bersih		(112)	124
LABA USAHA		23.019	22.936
Penghasilan pendanaan	32	526	441
Biaya pendanaan	32	(2.245)	(1.953)
Bagian laba investasi jangka panjang pada entitas asosiasi	10	2	5
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		21.302	21.429
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	27d		
Pajak kini		(4.106)	(4.611)
Pajak tangguhan		(375)	737
		(4.481)	(3.874)
LABA PERIODE BERJALAN		16.821	17.555
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran	22	(139)	141
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	10b	-	1
<i>Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Rugi aktuarial program manfaat pasti - bersih	30	(1.428)	(1)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih		(1.567)	141
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		15.254	17.696
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		12.756	13.310
Kepentingan nonpengendali	20	4.065	4.245
		16.821	17.555
Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		11.189	13.451
Kepentingan nonpengendali		4.065	4.245
		15.254	17.696
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	28		
Laba bersih per saham		128,77	134,36
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		12.876,76	13.436,00

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit)
 (Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal saham	Tambahkan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih			
					Ditetapkan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo, 1 Januari 2023		4.953	2.711	9.697	15.337	96.560	129.258	20.004	149.262	
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	26	26	
Dividen kas	29	-	-	-	-	(16.602)	(16.602)	(7.582)	(24.184)	
Modal saham kepentingan nonpengendali yang diperoleh kembali	1e	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	
Laba periode berjalan	20	-	-	-	-	12.756	12.756	4.065	16.821	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih		-	-	(139)	-	(1.428)	(1.567)	-	(1.567)	
Saldo, 30 Juni 2023		4.953	2.711	9.558	15.337	91.286	123.845	16.506	140.351	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit)
 (Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal saham	Tambahkan modal disetor	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba				
					Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2022		4.953	2.711	9.395	15.337	89.250	121.646	23.753	145.399
Penambahan setoran modal dari nonpengendali entitas anak		-	-	-	-	-	-	45	45
Penyesuaian kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	11	11
Dividen kas	29	-	-	-	-	(14.856)	(14.856)	(7.534)	(22.390)
Modal saham yang diperoleh kembali		-	-	-	-	-	-	(82)	(82)
Laba periode berjalan	20	-	-	-	-	13.310	13.310	4.245	17.555
Penghasilan komprehensif lain - bersih		-	-	141	-	-	141	-	141
Saldo, 30 Juni 2022		4.953	2.711	9.536	15.337	87.704	120.241	20.438	140.679

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

	Catatan	2023	2022
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		71.175	70.244
Penerimaan dari pendapatan bunga		522	443
Penerimaan restitusi pajak		97	2.281
Pembayaran kas untuk beban		(26.753)	(20.966)
Pembayaran kas kepada karyawan		(9.491)	(7.821)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(5.635)	(4.919)
Pembayaran beban bunga		(2.291)	(1.977)
Pembayaran sewa jangka pendek dan bernilai rendah	12	(1.650)	(1.429)
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih		(517)	(639)
Penerimaan (pembayaran) kas lainnya - bersih		163	(273)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		25.620	34.944
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari klaim asuransi	11	151	135
Hasil dari penjualan aset tetap	11	24	296
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	10	-	10
Pembelian aset tetap	11,39	(14.690)	(16.378)
Akuisisi tower oleh anak perusahaan		(1.648)	-
Pembelian aset takberwujud	14,39	(962)	(1.275)
Kenaikan (penurunan) uang muka dan aset lainnya	13	(257)	653
Penambahan investasi jangka panjang pada instrumen keuangan (Penempatan pada) hasil dari aset keuangan lancar lainnya - bersih	10	(228)	(1.048)
		(59)	38
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(17.669)	(17.569)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	18,19	21.045	23.932
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali		-	45
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	18,19	(9.546)	(15.231)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	21	-	(14.856)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak	20	(7.581)	(7.534)
Pembayaran kewajiban sewa		(3.113)	(2.063)
Pembelian saham kembali pemegang saham nonpengendali entitas anak	1e	(7)	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		798	(15.707)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		8.749	1.668
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(174)	181
PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT EKSPEKTASIAN		(1)	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	3	31.947	38.311
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3	40.521	40.160

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 21).

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan kebutuhan Perusahaan untuk melakukan penyesuaian kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan di atas sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No. 37 tanggal 22 Juni 2022. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0044650.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha yang secara umum meliputi:

- i. Usaha utama:
 - (a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 - (c) Melakukan investasi, termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- ii. Usaha penunjang:
 - (a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
 - (b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
 - (c) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, beralamatkan di Jalan Japati No. 1, Bandung.

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap lima tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut di atas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (“DJPPi”), sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“DJPT”).

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi, seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal. Sementara, untuk jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, dan jasa akses internet, terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan, seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan bruto.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Izin</u>	<u>No. Izin</u>	<u>Jenis jasa</u>	<u>Tanggal penetapan/ perpanjangan</u>
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPPi/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/M.KOMINFO/ 12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/M.KOMINFO/ 16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	1004/KEP/M.KOMINFO/ 2018	Jasa interkoneksi internet	26 Desember 2018
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	046/KEP/M.KOMINFO/ 02/2020	Jaringan sistem komunikasi data	3 Agustus 2020
Izin penyelenggaraan jasa untuk kategori layanan IPTV	022/KEP/M.KOMINFO/ 02/2021	Jasa multimedia layanan IPTV	25 Februari 2021
Izin penerbit uang elektronik dan penyelenggara transfer dana	Izin Bank Indonesia 23/587/DKSP/Srt/B	Penerbit uang elektronik dan penyelenggara transfer dana	1 Juli 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	073/KEP/M.KOMINFO/ 02/2021	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	23 Agustus 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	082/KEP/M.KOMINFO/ 02/2021	Jaringan tetap sambungan internasional	8 Oktober 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	094/KEP/M.KOMINFO/ 02/2021	Jaringan tetap tertutup	9 Desember 2021
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	095/KEP/M.KOMINFO/ 02/2021	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i> dan <i>packet switched</i>	9 Desember 2021

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, Internal Audit, dan Karyawan

i. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 35 tanggal 23 Juni 2023 dan No. 34 tanggal 18 Juni 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Komisaris Utama/	Bambang Permadi	Bambang Permadi
Komisaris Independen	Soemantri Brojonegoro	Soemantri Brojonegoro
Komisaris Independen	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Komisaris Independen	Bono Daru Adji	Bono Daru Adji
Komisaris Independen	Abdi Negara Nurdin	Abdi Negara Nurdin
Komisaris	Arya Mahendra Sinulingga	Arya Mahendra Sinulingga
Komisaris	Marcelino Rumambo Pandin	Marcelino Rumambo Pandin
Komisaris	Ismail	Ismail
Komisaris	Rizal Mallarangeng	Rizal Mallarangeng
Komisaris	Isa Rachmatarwata	Isa Rachmatarwata
Komisaris	Silmy Karim	-
Direktur Utama	Ririek Adriansyah	Ririek Adriansyah
Direktur <i>Enterprise & Business Service</i>	F.M. Venusiana R.	F.M. Venusiana R.
Direktur <i>Digital Business</i>	Muhamad Fajrin Rasyid	Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Afriwandi	Afriwandi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Heri Supriadi	Heri Supriadi
Direktur <i>Network & IT Solution</i>	Herlan Wijanarko	Herlan Wijanarko
Direktur <i>Strategic Portfolio</i>	Budi Setyawan Wijaya	Budi Setyawan Wijaya
Direktur <i>Wholesale & International Services</i>	Bogi Witjaksono	Bogi Witjaksono
Direktur <i>Group Business Development</i>	Honesti Basyir	-
Direktur <i>Consumer Service</i>	-	F.M. Venusiana R.

ii. Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit

Susunan Komite Audit, Corporate Secretary, dan Internal Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Ketua	Bono Daru Adji	Bono Daru Adji
Anggota	Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro	Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro
Anggota	Wawan Iriawan	Wawan Iriawan
Anggota	Abdi Negara Nurdin	Abdi Negara Nurdin
Anggota	Emmanuel Bambang Suyitno	Emmanuel Bambang Suyitno
Anggota	Edy Sihotang	Edy Sihotang
Corporate Secretary	Edwin Julianus Sebayang	R. Achmad Faisal
Internal Audit	Daru Mulyawan	Daru Mulyawan

iii. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (secara kolektif disebut “Grup”) pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah 20.879 orang dan 20.951 orang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamendemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Pada Rapat Umum Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2005 dan RUPST pada tanggal 29 Juni 2007, 20 Juni 2008, dan 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III, dan IV program Perusahaan untuk membeli kembali saham Seri B yang telah diterbitkan.

Selama periode 21 Desember 2005 sampai dengan 20 Juni 2007, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali 211.290.500 saham dari publik (program pembelian kembali saham tahap I). Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual seluruh saham tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Pada RUPST tanggal 19 April 2013, sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 38 tanggal 19 April 2013, para pemegang saham menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham treasury yang diakuisisi dalam tahap III. Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham Seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham Seri B (Catatan 21). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 30 Juni 2023, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 38.801.544 ADS telah dicatatkan pada NYSE (Catatan 21).

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun, dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan masing-masing telah dicatatkan di BEI (Catatan 19b).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan menjual sisa saham treasury tahap III.

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan menjual saham treasury tahap IV.

Pada RUPST tanggal 27 April 2018 yang diaktakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 54, para pemegang saham menyetujui pembatalan 1.737.779.800 saham treasury dengan mengurangi modal saham Perseroan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

i. Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2023	31 Desember 2022	30 Juni 2023	31 Desember 2022
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")	Jasa jaringan dan layanan telekomunikasi seluler	1995	65	65	98.235	100.991
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. ("Mitratel")	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya	1995	72	72	56.790	56.072
PT Multimedia Nusantara ("Metra")	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia	1998	100	100	19.099	18.710
PT Telekomunikasi Indonesia International ("Telin")	Jasa telekomunikasi dan informasi internasional	1995	100	100	13.794	13.949
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma")	Jasa konsultasi piranti keras, piranti lunak komputer, dan pusat penyimpanan data (<i>data center</i>)	1988	100	100	7.935	8.522
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat")	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait	1996	100	100	6.896	6.470
PT Graha Sarana Duta ("GSD")	Pembangunan, perdagangan, jasa, dan pengangkutan darat	1982	100	100	5.918	5.865
PT Telkom Akses ("Telkom Akses")	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi	2013	100	100	4.601	5.308
PT Telkom Data Ekosistem ("TDE")	<i>Data center</i>	1996	100	100	3.400	3.202
PT Metra-Net ("Metra-Net")	Jasa portal multimedia	2009	100	100	1.714	1.731
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infra")	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi	2014	100	100	1.495	1.360
PT PINS Indonesia ("PINS")	Jasa dan pembangunan telekomunikasi	1995	100	100	814	797
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo")	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network, Access Point ("NAP"), Voice Over Data ("VOD")</i> , dan jasa terkait lainnya	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%. Semua entitas anak dengan kepemilikan langsung berdomisili di Indonesia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2023	31 Desember 2022	30 Juni 2023	31 Desember 2022
PT Metra Digital Investama ("MDI")	Jasa perdagangan informasi dan teknologi, multimedia, hiburan dan investasi	2013	100	100	9.097	9.019
Telekomunikasi Indonesia International Ltd. ("Telin Hong Kong"), berdomisili di Hong Kong	Investasi dan layanan telekomunikasi	2010	100	100	3.479	2.981
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd. ("Telin Singapore"), berdomisili di Singapura	Telekomunikasi dan jasa terkait	2008	100	100	3.370	3.678
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia")	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa call center	1984	100	100	2.370	2.268
PT Telkom Landmark Tower ("TLT")	Jasa pengembangan dan manajemen properti	2012	55	55	2.062	2.100
PT Persada Sokka Tama ("PST")	Penyewaan menara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya	2008	100	100	1.545	1.401
PT Finnet Indonesia ("Finnet")	Jasa teknologi informatika	2006	60	60	1.533	1.248
PT Nuon Digital Indonesia ("Nuon")	Jasa penjualan konten digital	2010	100	100	1.241	1.199
PT Metra Digital Media ("MD Media")	Jasa informasi telekomunikasi dan informasi lainnya	2013	100	100	964	986
PT Telkomsel Mitra Inovasi ("TMI")	Jasa konsultan manajemen bisnis dan investasi	2019	100	100	912	945
PT Telkomsel Ekosistem Digital ("TED")	Informasi dan teknologi terkait jasa, multimedia, hiburan, dan investasi	2021	100	100	874	807
Telekomunikasi Indonesia International (TL) S.A. ("Telkomcel"), berdomisili di Timor Leste	Jasa telekomunikasi, jaringan, mobile, internet, dan data	2012	100	100	821	836
PT Administrasi Medika ("Ad Medika")	Jasa administrasi asuransi kesehatan	2002	100	100	706	632
PT Swadharna Sarana Informatika ("SSI")	Jasa pengisian kas dan pemeliharaan ATM	2001	51	51	452	458

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.
Selain yang disebutkan secara spesifik, entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung berdomisili di Indonesia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

ii. Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak	Jenis usaha	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase kepemilikan*		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			30 Juni 2023	31 Desember 2022	30 Juni 2023	31 Desember 2022
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN"), berdomisili di Malaysia	Jasa satelit	1996	70	70	417	566
PT Digital Aplikasi Solusi ("Digiserve")	Jasa sistem komunikasi	2014	100	100	357	384
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI")	Jasa dan perdagangan	2014	100	100	305	301
PT Graha Yasa Selaras ("GYS")	Jasa pariwisata	2012	51	51	285	285
Telekomunikasi Indonesia International Inc. ("Telin USA"), berdomisili di Amerika Serikat	Jasa telekomunikasi dan informasi	2014	100	100	282	294
PT Nutech Integrasi ("Nutech")	Jasa penyedia sistem integrator	2001	60	60	223	273
PT Graha Telkomsigma ("GTS")	Jasa pengelolaan dan konsultasi	1999	100	100	222	190
PT Collega Inti Pratama ("CIP")	Perdagangan dan jasa	2001	70	70	193	173
Telekomunikasi Indonesia Intl (Malaysia) Sdn. Bhd. ("Telin Malaysia"), berdomisili di Malaysia	Jasa telekomunikasi dan informasi	2013	70	70	139	125
PT Media Nusantara Data Global ("MNDG")	Jasa konsultasi	2012	55	55	123	116
PT Teknologi Data Infrastruktur ("TDI")	Jasa telekomunikasi dan data center	2013	100	100	112	7
Telekomunikasi Indonesia International (Australia) Pty. Ltd. ("Telin Australia"), berdomisili di Australia	Jasa telekomunikasi dan informasi	2013	100	100	87	33
PT Metra TV ("Metra TV")	Jasa penyiaran berlangganan	2013	100	100	46	34
PT Bosnet Distribution Indonesia ("BDI")	Perdagangan dan jasa konsultasi	2012	60	60	39	36
PT Pojok Celebes Mandiri ("PCM")	Usaha pariwisata	2008	100	100	31	33
PT Metraplaza ("Metraplaza")	Jasa jaringan dan e-commerce	2012	60	60	30	30

*Persentase kepemilikan sebesar 99,99% disajikan dengan pembulatan menjadi 100%.
Selain yang disebutkan secara spesifik, entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung berdomisili di Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Informasi penting lainnya

i. Perusahaan

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan telah menandatangani Akta Pemisahan Segmen Usaha IndiHome ke Telkomsel yang juga telah disetujui melalui RUPST tanggal 23 Juni 2023. Nilai bisnis IndiHome yang dialihkan adalah Rp58.250 miliar. Bersamaan dengan pemisahan IndiHome tersebut, Singapore Telecommunication Ltd. ("Singtel") juga memutuskan untuk turut melakukan penyertaan modal dengan melakukan setoran secara tunai kepada Telkomsel sebesar Rp2.713 miliar. Hal ini menjadikan kepemilikan efektif Perusahaan di Telkomsel menjadi 69,9%, sementara kepemilikan Singtel di Telkomsel menjadi 30,1%. Peningkatan modal Telkomsel ini diharapkan akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2023.

ii. Mitratel

Pada tanggal 2 Juni 2022, Mitratel mengumumkan untuk melakukan pembelian kembali saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.000 miliar. Periode pembelian kembali saham Mitratel adalah selama tiga bulan dari tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022. Mitratel telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 885.200.000 lembar saham atau setara dengan Rp681 miliar. Pada tanggal 6 Maret 2023, Mitratel kembali mengumumkan untuk melakukan pembelian kembali saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.500 miliar. Periode pembelian kembali saham Mitratel dimulai 14 April 2023. Mitratel telah melakukan pembelian kembali saham pada tanggal 7 Juni 2023 sampai 30 Juni 2023 sebanyak 10.350.000 lembar saham atau setara dengan Rp7 miliar.

Pada tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat atau *Conditional Sale and Purchase Agreement* ("CSPA") Menara Telekomunikasi antara PT Indosat Tbk. ("Indosat") dengan Mitratel, untuk melakukan akuisisi 997 menara telekomunikasi milik Indosat senilai Rp1.648 miliar. Mitratel dan Indosat juga menyepakati penyewaan kembali oleh Indosat atas slot pada menara telekomunikasi yang dialihkan/diakuisisi kepada Mitratel sebanyak 983 site selama 10 tahun masa sewa. Penandatanganan akta pengalihan antara Mitratel dengan Indosat telah ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2023. Perhitungan *Purchase Price Allocation* ("PPA") masih dalam proses oleh KJPP Nirboyo, Dewi Apriyanti and Partners, sebagai penilai independen.

iii. Sigma

Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. No. 120 tanggal 19 April 2022, Perusahaan melakukan transaksi pengambilalihan saham Sigma, sehingga kepemilikan langsung Perusahaan pada Sigma menjadi 56,39% dan menyebabkan terdilusinya porsi kepemilikan Metra menjadi 43,61%.

f. Penyelesaian dan kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 Juli 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp") dan jutaan US\$, kecuali dinyatakan lain. Untuk angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini yang masih mengandung nilai tetapi di bawah Rp1 miliar dan US\$ 1 juta disajikan dengan angka nol.

Standar akuntansi baru

Pada tanggal 1 Januari 2023, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- i. Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- ii. Amendemen PSAK 16: Aset Tetap
- iii. Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- iv. Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2024:

- i. Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
Amendemen ini mengklarifikasi terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan dan klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang.
- ii. Amendemen PSAK 73: Sewa
Amendemen ini mengatur tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak di mana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur, atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak suara menghasilkan kontrol. Untuk mendukung anggapan ini bila Grup memiliki mayoritas atau kurang dari mayoritas hak suara atau hak serupa dari *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah Grup memiliki kuasa atas *investee*, termasuk:

- i. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii. Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii. Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, dan arus kas atas transaksi antar-Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- i. menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- ii. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- iii. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- iv. mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian; dan
- v. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasian yang dapat diatribusikan pada Grup.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis dan *goodwill* (lanjutan)

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar di mana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat di luar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar saat tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interests*).

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas di laporan posisi keuangan terdiri dari kas di tangan, kas dan bank, dan deposito jangka pendek yang sangat likuid dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, yang siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan deposito jangka pendek, sesuai definisi di atas, setelah dikurangi dengan saldo cerukan bank karena dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas Grup.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset keuangan lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 2u).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Investasi pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas di mana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak. Kepemilikan 20% atau lebih hak suara *investee* (dimiliki secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan) dianggap menimbulkan pengaruh signifikan, kecuali dapat dijelaskan secara jelas bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Sebaliknya, kepemilikan kurang dari 20% hak suara dianggap tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa sebenarnya terdapat pengaruh signifikan.

Adanya pengaruh signifikan biasanya akan dibuktikan dengan satu atau beberapa cara sebagai berikut:

- i. Keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara dari *investee*;
- ii. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen dan distribusi lainnya;
- iii. Transaksi material di antara investor dan *investee*;
- iv. Pertukaran personil manajerial; atau
- v. Penyediaan informasi teknis penting.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- i. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi, atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu, dan
- ii. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi, maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Investasi jangka panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk tujuan pelaporan investasi dengan menggunakan metode ekuitas tersebut, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs" karena penjabaran laporan keuangan pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang dihitung berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Piutang dihapuskan pada tahun ditetapkan tidak tertagih (Catatan 2u).

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan voucher prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih ditentukan dengan mengestimasi harga jual, dikurangi estimasi biaya penjualan atau menentukan biaya penggantian yang berlaku.

Biaya persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehannya.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi jumlah terpulihkan, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

Aset takberwujud, kecuali *goodwill*, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-50
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-40
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Kendaraan	4-8
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Peralatan lainnya	2-5

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Berdasarkan reviu umur manfaat aset tetap khususnya menara di Indonesia mengalami perubahan dari tahun sebelumnya sejalan perkembangan teknologi dan perubahan ekspektasi tingkat pemakaian. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima, dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian dari aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan, dikapitalisasi ke akun aset tetap yang terkait.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai (jika ada), hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai, dan aset tetap siap untuk digunakan atau dijual.

m. Sewa

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak, kecuali dalam kasus di mana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman dalam PSAK 73, antara lain:

- penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa;
- akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 bulan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal untuk pengukuran aset hak guna sebagai sewa jangka pendek;
- penggunaan tinjauan ke belakang dalam menentukan masa sewa di mana kontrak berisi opsi untuk perpanjangan atau pemutusan masa sewa;
- tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan sebagai konsekuensinya Grup menganggap seluruh kontrak sebagai sewa; dan
- untuk tidak mengakui liabilitas sewa dan aset hak guna untuk sewa di mana aset dasar adalah aset bernilai rendah (yaitu aset dasar dengan nilai maksimum US\$5.000 atau Rp50 juta dalam kondisi baru).

Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa.

i. Grup sebagai lessee

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Tanah	1-33
Bangunan	1-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-25
Kendaraan	4-8
Lain-lain	2-25

Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang cukup pasti akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

i. Grup sebagai *lessee* (lanjutan)

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental karena tingkat suku bunga implisit sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Grup sebagai *lessor*

Berdasarkan PSAK 73, *lessor* terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa di mana Grup mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepisi dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Grup mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada *lessor* oleh *lessee*. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang cukup pasti akan dilakukan oleh *lessee* dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 71, penyisihan kerugian kredit ekspektasian telah diakui sebagai piutang sewa dan disajikan sebagai "Piutang lain-lain"

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset tetap dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan pendapatan PSAK 72 dari kontrak dengan pelanggan untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak. Pendapatan yang timbul dari sewa operasi dicatat sebagai Pendapatan dari transaksi *lessor* (Catatan 2r).

n. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang dan/atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia, TS Global Network Sdn. Bhd., dan Telekomunikasi Indonesia International Sdn. Bhd. yang menggunakan Ringgit Malaysia.

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	14.990	14.997	15.567	15.571
Dolar Australia ("AU\$") 1	10.025	10.030	10.583	10.589
Dolar Singapura ("SGD") 1	11.108	11.112	11.614	11.622
Dolar Taiwan Baru ("TWD") 1	482,80	483,12	508,15	508,47
Euro ("EUR") 1	16.398	16.405	16.623	16.635
Yen Jepang ("JPY") 1	104,29	104,35	118,12	118,17
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.211	3.216	3.529	3.539
Dolar Hong Kong ("HKD") 1	1.914	1.914	1.996	1.997

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, di mana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2I).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

PSAK 72 menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah tunggal untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang terkait dengan biaya yang dikapitalisasi.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk setiap jenis pendapatan:

i. Mobile

Pendapatan dari *mobile* terutama terdiri dari pendapatan dari layanan seluler yang antara lain: layanan telepon, layanan interkoneksi, layanan internet dan data, dan layanan *Short Messaging Service* ("SMS"). Layanan tersebut ditawarkan secara pascabayar atau Prabayar.

Untuk layanan Prabayar, penjualan paket perdana (juga dikenal sebagai kartu SIM dan voucher perdana) dan voucher isi ulang pada awalnya diakui sebagai liabilitas kontrak. Grup mengakui aset kontrak untuk penyediaan jasa dari pelanggan pascabayar yang belum ditagih.

Seluruh pendapatan layanan *mobile* diakui berdasarkan metode *output*, baik per penggunaan aktual atau estimasi unit yang digunakan (jika layanan dijual berdasarkan paket), karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh Grup.

Untuk layanan yang dijual dalam paket bundel, total penerimaan dari pelanggan dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri untuk setiap produk dan/atau layanan. Grup mengestimasi harga jual yang berdiri sendiri menggunakan harga yang berlaku jika layanan tersebut dijual dengan basis yang berdiri sendiri. Sebagian besar paket bundel yang dijual oleh Grup hanya mencakup layanan yang pada umumnya terselesaikan selama periode waktu yang sama. Karena itu, pola pengakuan pendapatan umumnya tidak dipengaruhi oleh alokasi.

Pembayaran yang diterima dialokasikan antara layanan telekomunikasi yang terjual dan jumlah poin yang dikeluarkan, dengan nilai yang dialokasikan ke poin yang setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan saat poin tersebut ditukarkan, berakhir masa berlakunya, atau pada saat program tersebut dihapus.

ii. Consumer

Pendapatan dari *consumer* terutama terdiri dari pendapatan telepon tidak bergerak dan layanan Indihome. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak berasal dari pelanggan yang hanya berlangganan layanan telepon tidak bergerak. Sedangkan pendapatan dari layanan Indihome berasal dari pelanggan yang berlangganan layanan internet atau paket layanan bundel kombinasi layanan *consumer* (misal telepon, internet dan data, serta TV berbayar). Layanan tersebut ditawarkan berdasarkan pascabayar yang ditagih pada bulan berikutnya. Pada tahun 2021, Grup telah menerapkan syarat dan ketentuan baru bahwa kontrak dengan pelanggan adalah kontrak terbuka dengan minimal 12 bulan dan penalti terminasi dini yang substantif. Periode kontrak berdasarkan PSAK 72 selama 12 bulan dan selanjutnya kontrak bulanan.

Seluruh layanan *consumer* diakui menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual pelanggan atau waktu yang telah berlalu ketika pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

ii. *Consumer* (lanjutan)

Pelanggan mungkin diharuskan membayar biaya di muka pada saat dimulainya kontrak. Biaya di muka dianggap sebagai hak material karena pelanggan tidak diharuskan membayar biaya di muka ketika pelanggan memperbarui layanan di luar periode kontrak asli. Grup menilai opsi pembaruan sebesar pembayaran yang diterima dari biaya di muka untuk layanan instalasi. Grup menanggung nilai tersebut sebagai liabilitas kontrak dan mengakuinya sebagai pendapatan berdasarkan metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Grup memperkirakan jangka waktu hubungan dengan pelanggan berdasarkan informasi historis dan tren pelanggan serta memperbarui evaluasi tersebut setiap tahun.

iii. *Enterprise*

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* terutama terdiri atas pendapatan dari penyediaan jasa telepon, data dan internet, teknologi informasi, dan jasa lainnya (misal *manage service*, *call center*, *e-health*, *e-payment*, dan lain-lain). Beberapa kontrak dengan pelanggan perusahaan dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan.

Pendapatan dari pelanggan *enterprise* diakui sepanjang waktu menggunakan metode *output* berdasarkan penggunaan aktual atau waktu yang telah berlalu jika penyediaan layanan tidak tergantung pada penggunaan (yaitu menit suara, *kilobyte data*, dan lain-lain), kecuali untuk penjualan barang yang diakui pada waktu tertentu, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh Grup. Pendapatan untuk kewajiban kinerja yang dipenuhi pada waktu tertentu diakui ketika pengendalian barang dipindahkan ke pelanggan, biasanya ketika pelanggan memiliki fisik barang.

Beberapa perjanjian dengan pelanggan *enterprise* ditawarkan sebagai produk bundel. Untuk pengaturan yang dibundel, produk dan/atau jasa dalam kontrak dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri ketika secara terpisah dapat diidentifikasi dari janji-janji lain dalam kontrak dan pelanggan dapat mengambil manfaat dari produk/jasa itu sendiri. Total pembayaran dialokasikan untuk masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda yang telah dimasukkan dalam kontrak, berdasarkan harga jualnya yang berdiri sendiri. Harga jual yang berdiri sendiri ditentukan berdasarkan harga yang dapat diobservasi di mana produk dan/atau jasa individual dijual secara terpisah, disesuaikan dengan kondisi pasar dan diskon normal yang sesuai. Ketika harga yang dapat diobservasi tidak tersedia, biaya yang diharapkan ditambah pendekatan margin digunakan untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri.

Kontrak tertentu dengan pelanggan *enterprise* dapat menimbulkan imbalan variabel karena harga kontrak tergantung pada peristiwa di masa mendatang (misal kontrak berbasis penggunaan atau kontrak berbasis bagi hasil). Dalam memperkirakan imbalan variabel ini, Grup diharuskan untuk menggunakan metode nilai yang diharapkan atau metode jumlah yang paling mungkin berdasarkan metode yang lebih baik memprediksi jumlah pembayaran yang menjadi haknya. Grup menentukan bahwa metode nilai yang paling diharapkan adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam memperkirakan imbalan variabel untuk satu kontrak dengan sejumlah besar kemungkinan hasil.

Sebelum memasukkan jumlah imbalan variabel dalam harga transaksi, Grup mempertimbangkan apakah jumlah imbalan variabel dibatasi. Grup menentukan bahwa taksiran imbalan variabel tidak dibatasi berdasarkan pengalaman historisnya, estimasi bisnis, dan kondisi ekonomi saat ini dan hanya mencakup imbalan variabel sepanjang kemungkinan besar pembalikan signifikan dalam jumlah pendapatan kumulatif yang diakui tidak akan terjadi ketika ketidakpastian terkait dengan imbalan variabel selanjutnya diselesaikan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

iii. *Enterprise* (lanjutan)

Ketika pihak lain terlibat dalam menyediakan produk dan/atau jasa kepada pelanggan, Grup bertindak sebagai prinsipal jika Grup mengendalikan produk dan/atau jasa yang ditentukan sebelum produk dan/atau jasa tersebut ditransfer ke pelanggan. Pendapatan dicatat pada jumlah bersih yang diterima (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok), ketika, pada dasarnya, Grup telah bertindak sebagai agen dan mendapat komisi dari pemasok produk dan/atau jasa yang dijual.

iv. *Wholesale and International Business* ("WIB")

Pendapatan dari WIB terutama terdiri dari jasa interkoneksi untuk interkoneksi panggilan pelanggan operator telekomunikasi lainnya ke pelanggan Grup (panggilan masuk) dan panggilan antara pelanggan operator telekomunikasi lainnya melalui jaringan Grup (transit) dan jasa jaringan dengan operator telekomunikasi lainnya. Semua jasa ini diakui berdasarkan metode *output* menggunakan basis *traffic* aktual yang tercatat untuk bulan tersebut.

Aset kontrak

Aset kontrak awalnya diakui dari pendapatan atas pengalihan barang atau jasa karena penerimaan imbalan masih bersyarat tahapan tertentu atau setelah penyelesaian proyek. Setelah penyelesaian syarat tahapan tertentu atau proyek, jumlah yang diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha.

Aset kontrak dilakukan penilaian penurunan nilai.

Liabilitas kontrak

Liabilitas kontrak diakui jika pembayaran diterima atau pembayaran telah jatuh tempo (mana yang lebih awal) dari pelanggan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa. Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan ketika Grup melaksanakan kewajiban dalam kontrak (misal mengalihkan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan).

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan

Biaya inkremental untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan, yang pada dasarnya terdiri dari komisi penjualan dan biaya pemenuhan kontrak, pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai biaya kontrak. Biaya-biaya ini kemudian diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan periode dan pola pengiriman produk atau jasa terkait ke pelanggan. Biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai biaya untuk mendapatkan/memenuhi kontrak dengan pelanggan dibebankan pada saat terjadinya atau sesuai dengan standar terkait lainnya.

Setiap akhir tahun pelaporan, Grup melakukan evaluasi apakah terdapat indikasi bahwa biaya kontrak yang dikapitalisasi mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat biaya kontrak melebihi nilai yang diharapkan diterima dari pertukaran barang dan jasa. Ketika terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai diakui di laba atau rugi.

Pendapatan dari transaksi *lessor*

Pendapatan dari transaksi *lessor* terdiri dari pendapatan dari sewa operasi atas menara telekomunikasi dan sewa lainnya. Pendapatan sewa diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang di mana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- (a) ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- (b) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, di mana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuaria).

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari *IAS 19 Employee Benefits*. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19*. Grup telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Grup mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Grup telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material di bawah program tersebut.

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

t. Pajak

Pajak Penghasilan ("PPh")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas di mana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau secara substantif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT Tahunan") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak (lanjutan)

Pemeriksaan pajak

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditanggguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak tangguhan

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan berlaku terhadap penghasilan kena pajak ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

Pajak tangguhan suatu transaksi diakui di luar laba rugi, oleh karena itu pajak tangguhan atas transaksi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau diakui langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Otoritas Pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk dipulihkan atau diselesaikan.

Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak (lanjutan)

Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Pajak final

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan lain-lain - bersih".

u. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), dan nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Grup menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Grup menerapkan panduan praktis, diukur pada harga transaksi yang telah ditentukan berdasarkan PSAK 72.

Agar aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai *Solely Payment of Principal and Interest ("SPPI") testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari perolehan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

(a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya.

(b) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- (c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tanpa fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Pilihan ini dilakukan pada level instrumen per instrumen. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan, kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak terpengaruh pada persyaratan penurunan nilai. Aset keuangan Grup pada kategori ini meliputi investasi jangka panjang pada instrumen keuangan.

- (d) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan yang dikelola untuk diperdagangkan, aset keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Aset keuangan yang tidak memenuhi *SPPI testing* diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas apapun model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika penerapan itu dapat menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, inkonsistensi pengukuran atau pengakuan.

Aset keuangan kategori ini pada laporan posisi keuangan diukur pada nilai wajarnya di mana keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai hasil dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Aset keuangan Grup diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari investasi jangka panjang pada instrumen keuangan dan aset keuangan lancar lainnya.

Kerugian kredit ekspektasian

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian dalam 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan untuk kerugian kredit ekspektasian selama sisa umurnya, terlepas dari waktu gagal bayar (sepanjang umurnya).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Grup telah membentuk model provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) yaitu kondisi pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi gagal bayar ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Penghapusan piutang usaha dilakukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan untuk pinjaman sebesar pinjaman yang diterima setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau (b) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, deposit pada pelanggan, pinjaman, pinjaman, dan liabilitas sewa. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi, utang bank jangka panjang dan pinjaman lainnya.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

(a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini mencakup juga derivatif yang tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan liabilitas keuangan untuk dapat ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditentukan pada saat pengakuan awal, dan hanya jika kriteria-kriteria yang terdapat dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

(b) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini merupakan yang paling relevan bagi Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode suku bunga efektif. Amortisasi metode suku bunga efektif diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini secara umum berlaku untuk pinjaman. Informasi lebih lanjut dapat mengacu ke Catatan 19 Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Lainnya.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- (i) situasi bisnis yang normal;
- (ii) peristiwa *default*; dan
- (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

iv. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dan nilai yang diperoleh kembali dari penjualan kembali saham treasury di masa mendatang, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor dalam ekuitas.

w. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

y. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional ("PKO") Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

z. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang merugi diakui ketika kontrak tersebut menjadi merugi sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset non-keuangan mengalami penurunan nilai aset. Aset tersebut meliputi atas aset tetap, aset lancar, dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset takberwujud. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

ab. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar. Suatu aset disajikan sebagai lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal;
- ii. untuk diperdagangkan; atau
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
- iv. kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai lancar bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal;
- ii. untuk diperdagangkan;
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan; atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menanggungkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat keputusan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan yang menyertainya, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian tentang asumsi dan perkiraan ini dapat menghasilkan hasil yang memerlukan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode mendatang.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

i. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut.

ii. Estimasi dan asumsi

Estimasi dan asumsi terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi pada saat tanggal pelaporan yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

(a) Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 30 dan 31.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(b) Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan reviu atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan percepatan penyusutan aset *Multi-Service Access Node* ("MSAN") sampai tahun 2022. Pada tahun 2022, Grup mengubah estimasi umur manfaat menara di Indonesia (Catatan 11).

(c) Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian - Grup sebagai *lessee*

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika cukup pasti akan dilaksanakan, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan masa sewa, jika cukup pasti untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan sewa, mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Grup menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam kendali yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak opsi perpanjangan atau penghentian.

(d) Penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk metodologi terkait penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk deposito berjangka dan instrumen utang, risiko kredit nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang. Selain itu, Grup mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(d) Penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan (lanjutan)

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang lain-lain dan aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas nilai piutang dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat terkait penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan pada Catatan 5.

Grup juga mengamati perubahan dari keserupaan karakteristik risiko dari piutang usaha tertentu dengan mengevaluasi segmentasi portofolio pelanggan, di mana pelanggan tersebut mungkin terlibat dalam industri bisnis, atau berlokasi di area, yang telah terpengaruh, atau lebih rentan terhadap pandemi. Grup telah mengkaji ulang model yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan informasi terkini yang wajar dan didukung untuk lebih mencerminkan perubahan kondisi saat ini. Metode dan pendekatan akan terus dimonitor dan diperbaharui jika terdapat tambahan informasi yang wajar, didukung, dan tersedia; termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) dan masukan lainnya.

(e) Pendapatan

(i) Pertimbangan penting dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, waktu pengakuan pendapatan dan klasifikasi pendapatan

Grup menyediakan jasa teknologi informatika dengan spesifikasi sesuai pesanan pelanggan. Produk sesuai pesanan pelanggan terdiri dari berbagai barang dan/atau jasa yang dijual dalam satu rangkaian tidak terpisah untuk memberikan layanan solusi terintegrasi kepada pelanggan. Selain produk sesuai pesanan pelanggan, Grup juga menyediakan beberapa produk standar sebagai bagian dari solusi terintegrasi dalam kontrak dengan pelanggan. Diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menentukan jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan dalam kontrak tersebut. Jumlah dan sifat kewajiban pelaksanaan akan menentukan waktu pengakuan pendapatan untuk kontrak tersebut.

Grup menelaah penentuan kewajiban pelaksanaan berdasarkan kontrak per kontrak. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dinilai memiliki satu kewajiban pelaksanaan, Grup menerapkan metode tunggal untuk mengukur tingkat penyelesaian kewajiban pelaksanaan berdasarkan metode pengukuran yang paling menggambarkan ekonomi kontrak, yang dalam banyak kasus adalah berdasarkan waktu.

Grup juga menyajikan klasifikasi pendapatan dengan menggunakan pendekatan yang konsisten. Ketika suatu kontrak yang terdiri dari beberapa barang dan/atau jasa dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan tersendiri, Grup menyajikan kewajiban pelaksanaan dalam komponen laporan keuangan yang paling mewakili layanan utama Grup, yaitu internet, data, dan jasa teknologi informatika.

(ii) Pertimbangan penting dalam menentukan harga jual yang berdiri sendiri

Grup menyediakan beragam produk yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Untuk menentukan harga jual yang berdiri sendiri untuk barang dan/atau jasa yang tidak dapat diamati, Grup menggunakan pendekatan margin biaya ditambah biaya yang diharapkan. Grup menentukan margin yang sesuai berdasarkan data historis.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

ii. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

(f) Uji penurunan nilai aset tidak lancar dan *goodwill*

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan *goodwill*, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

Perhitungan arus kas masa depan dalam menentukan nilai wajar aset tetap dan aset tidak lancar lainnya dari entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi melibatkan estimasi yang signifikan. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

(g) Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Ketika nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak dapat diukur pada harga kuotasian di pasar aktif, nilai wajar diukur menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas diskonto. Input atas model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi apabila memungkinkan, namun apabila tidak tersedia, sejumlah pertimbangan diperlukan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan mencakup input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

(h) Akuisisi

Grup mengevaluasi setiap transaksi akuisisi untuk menentukan akan diperlakukan sebagai akuisisi aset atau kombinasi bisnis. Untuk transaksi yang diperlakukan sebagai akuisisi aset, harga pembelian dialokasikan untuk aset yang diperoleh, tanpa pengakuan *goodwill*. Untuk akuisisi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, Grup menerapkan metode akuntansi untuk kombinasi bisnis atas aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan hasil operasi disertakan dengan hasil Grup dari tanggal akuisisi masing-masing.

Setiap kelebihan dari harga pembelian dibayar atas jumlah yang diakui untuk aset yang diperoleh dan liabilitas diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Grup terus mengevaluasi akuisisi yang diperhitungkan sebagai kombinasi bisnis untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun setelah tanggal akuisisi yang berlaku dari setiap transaksi untuk menentukan apakah penyesuaian tambahan diperlukan untuk alokasi harga pembelian yang dibayarkan untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih biasanya ditentukan dengan menggunakan salah satu perkiraan biaya penggantian atau metode penilaian arus kas diskonto. Ketika menentukan nilai wajar dari aset berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan biaya untuk mengganti aset dengan aset baru dengan mempertimbangkan faktor seperti umur, kondisi, dan masa manfaat ekonomi dari aset. Ketika menentukan nilai wajar dari aset tidak berwujud yang diperoleh, Grup memperkirakan tingkat diskonto yang berlaku dan waktu dan jumlah arus kas masa depan, termasuk tingkat dan persyaratan atas perpanjangan dan pengurangan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS - BERSIH

		30 Juni 2023		31 Desember 2022	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan)	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kas	Rp	-	47	-	11
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	Rp	-	6.718	-	6.413
	US\$	33	491	49	758
	EUR	2	35	2	34
	HKD	2	3	3	5
	JPY	6	1	6	1
	AU\$	0	0	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	Rp	-	6.875	-	2.691
	US\$	11	166	11	179
	TWD	0	0	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	Rp	-	5.452	-	4.298
	US\$	12	174	7	111
	SGD	0	0	0	0
	EUR	0	0	0	0
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	Rp	-	5.331	-	2.713
Lain-lain	Rp	-	45	-	230
	US\$	-	-	0	0
Sub-jumlah			25.291		17.433
Pihak ketiga					
PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	964	-	1.379
	US\$	9	135	0	5
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC Hongkong")	US\$	67	1.003	55	861
	HKD	31	59	5	10
PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata")	Rp	-	361	-	412
DBS Bank (Hong Kong) Ltd. ("DBS Hong Kong")	US\$	20	301	0	0
	HKD	0	0	0	0
PT Bank Permata Tbk. ("Permata Syariah")	Rp	-	201	-	0
JPMorgan Chase & Co.	US\$	10	153	9	140
Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	Rp	-	103	-	75
Lain-lain	Rp	-	239	0	330
	US\$	16	242	24	375
	SGD	6	70	7	82
	TWD	32	16	58	29
	AU\$	2	21	2	23
	MYR	3	10	5	17
	MMK	363	3	386	3
	EUR	0	0	0	0
Sub-jumlah			3.881		3.741
Jumlah bank			29.172		21.174
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	1.142	-	378
	US\$	25	382	9	145
BRI	Rp	-	977	-	845
	US\$	10	149	21	319
BTN	Rp	-	860	-	1.655
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	Rp	-	598	-	1.220
Bank Mandiri	Rp	-	166	-	844
	US\$	26	385	31	489
Sub-jumlah			4.659		5.895

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS - BERSIH (lanjutan)

	Mata uang	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)					
Pihak ketiga					
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	1.814	-	1.986
	US\$	12	173	12	181
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	1.507	-	1.423
BPD	Rp	-	1.129	-	25
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Maybank")	Rp	-	279	-	220
	US\$	34	514	14	224
	MYR	-	-	2	6
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Rp	-	400	-	295
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")	Rp	-	-	-	40
	US\$	21	318	9	133
Bank CIMB Niaga	Rp	-	209	-	122
	US\$	-	-	11	168
Bank Permata	Rp	-	150	-	-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")	US\$	5	75	-	-
Lain-lain	Rp	-	52	-	45
	US\$	2	24	-	-
Sub-jumlah			<u>6.644</u>		<u>4.868</u>
Jumlah deposito berjangka			11.303		10.763
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian			(1)		(1)
Jumlah			<u>40.521</u>		<u>31.947</u>

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Rupiah	1,95% - 6,50%	1,95% - 6,50%
Mata uang asing	2,50% - 4,90%	0,25% - 4,05%

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik negara (pihak berelasi) karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank yang sehat secara finansial karena dimiliki oleh negara.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
	Saldo		Saldo	
	Mata uang	Mata uang asing (dalam jutaan) Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan) Setara Rupiah	Setara Rupiah
Deposito berjangka				
Pihak berelasi				
BNI	Rp	-	129	-
Bank Mandiri	Rp	-	40	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	US\$	5	75	5
Pihak ketiga	Rp	-	137	-
United Overseas Bank Limited Singapore ("UOB Singapore")	US\$	12	174	12
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited ("SCB Singapore")	US\$	9	128	7
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100 miliar)	Rp	-	-	-
	US\$	2	31	2
Jumlah deposito berjangka		714	653	653
Rekening penampungan	Rp	-	297	-
	US\$	1	18	2
Jumlah rekening penampungan		315	413	413
Reksa dana				
Pihak berelasi				
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100 miliar)	Rp	-	84	-
Pihak ketiga				
PT Henan Putihrai Asset Management ("HPAM")	Rp	-	289	-
Jumlah reksa dana		373	281	281
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 100 miliar)	Rp	-	0	-
	US\$	0	0	0
	MYR	0	0	0
Jumlah lainnya		0	2	2
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian		(0)	(0)	(0)
Jumlah		1.402	1.349	1.349

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Rupiah	2,50% - 5,00%	2,50% - 5,00%
Mata uang asing	1,95% - 5,41%	1,95% - 5,06%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

5. PIUTANG USAHA - BERSIH

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")	2.184	1.985
PT Indonusa Telemedia ("Indonusa")	386	385
Indosat	374	175
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	205	156
Jumlah	3.149	2.701
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.386)	(1.081)
Jumlah bersih	1.763	1.620

(ii) Pihak ketiga

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Pelanggan individual dan bisnis	13.882	12.517
Penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri	1.089	984
Jumlah	14.971	13.501
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(6.583)	(6.487)
Jumlah bersih	8.388	7.014

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Sampai dengan 3 bulan	1.906	1.522
3 sampai dengan 6 bulan	304	183
Lebih dari 6 bulan	939	996
Jumlah	3.149	2.701
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.386)	(1.081)
Jumlah bersih	1.763	1.620

(ii) Pihak ketiga

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Sampai dengan 3 bulan	8.545	7.116
3 sampai dengan 6 bulan	926	481
Lebih dari 6 bulan	5.500	5.904
Jumlah	14.971	13.501
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(6.583)	(6.487)
Jumlah bersih	8.388	7.014

(iii) Umur total piutang usaha

	30 Juni 2023			31 Desember 2022		
	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Tingkat kerugian kredit ekspektasian	Sebelum penyisihan	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	Tingkat kerugian kredit ekspektasian
Belum jatuh tempo	7.024	795	11,3%	6.964	399	5,7%
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	3.427	546	15,9%	1.674	349	20,8%
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	1.230	375	30,5%	664	222	33,4%
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	6.439	6.253	97,1%	6.900	6.598	95,6%
Jumlah	18.120	7.969		16.202	7.568	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

5. PIUTANG USAHA - BERSIH (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha (lanjutan)

Grup telah membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp3.922 miliar dan Rp2.069 miliar. Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan historis tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rupiah	3.147	2.694
Dolar A.S.	2	7
Jumlah	3.149	2.701
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(1.386)	(1.081)
Jumlah bersih	<u>1.763</u>	<u>1.620</u>

(ii) Pihak ketiga

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rupiah	13.344	12.020
Dolar A.S.	1.474	1.352
Dolar Singapura	111	89
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	42	40
Jumlah	14.971	13.501
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(6.583)	(6.487)
Jumlah bersih	<u>8.388</u>	<u>7.014</u>

d. Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	7.568	7.802
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	803	567
Penghapusbukuan piutang	(402)	(801)
Saldo akhir	<u>7.969</u>	<u>7.568</u>

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha sudah cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, piutang usaha tertentu atas entitas anak masing-masing sebesar Rp947 miliar dan Rp1.129 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18a dan 19c).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

6. ASET KONTRAK - BERSIH

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Aset kontrak	2.534	2.610
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	(175)	(119)
Jumlah bersih	2.359	2.491
Lancar	(2.249)	(2.457)
Tidak Lancar	110	34

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas aset kontrak sudah cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya aset kontrak.

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

7. PERSEDIAAN - BERSIH

Persediaan diakui sebesar nilai realisasi bersih, terdiri atas:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Komponen	534	588
Kartu SIM dan voucher Prabayar	297	321
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	343	294
Jumlah	1.174	1.203
Provisi atas persediaan usang	(56)	(59)
Jumlah bersih	1.118	1.144

Manajemen berpendapat saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan yang diakui sebagai beban termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp349 miliar dan Rp350 miliar (Catatan 25).

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, tidak ada persediaan yang dijamin dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, modul (bagian dari aset tetap) dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp86 miliar dan Rp94 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp111 miliar.

Manajemen berkeyakinan nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

8. ASET LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - bagian jangka pendek (Catatan 35c.i)	3.463	5.289
Uang muka	1.064	679
Gaji dibayar di muka	571	218
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	867	574
Jumlah	<u>5.965</u>	<u>6.760</u>

9. BIAYA KONTRAK

Rincian dari biaya kontrak adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>		
	<u>Biaya perolehan kontrak</u>	<u>Biaya pemenuhan kontrak</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo, 1 Januari 2023	1.554	858	2.412
Amortisasi selama tahun berjalan	(187)	(1.877)	(2.064)
Penambahan selama tahun berjalan	226	2.096	2.322
Saldo, 30 Juni 2023	1.593	1.077	2.670
Lancar	(379)	(318)	(697)
Tidak lancar	<u>1.214</u>	<u>759</u>	<u>1.973</u>

	<u>31 Desember 2022</u>		
	<u>Biaya perolehan kontrak</u>	<u>Biaya pemenuhan kontrak</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo, 1 Januari 2022	1.532	732	2.264
Amortisasi selama tahun berjalan	(338)	(514)	(852)
Penambahan selama tahun berjalan	360	640	1.000
Saldo, 31 Desember 2022	1.554	858	2.412
Lancar	(354)	(317)	(671)
Tidak lancar	<u>1.200</u>	<u>541</u>	<u>1.741</u>

Tidak ada penyisihan atas penurunan nilai biaya kontrak pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

10. INVESTASI JANGKA PANJANG

Rincian dari investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Instrumen keuangan		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:		
Ekuitas	8.200	7.624
Obligasi konversi	886	884
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:		
Ekuitas	22	22
	<u>9.108</u>	<u>8.530</u>
Entitas asosiasi		
PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin")	104	115
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	6	8
	<u>110</u>	<u>123</u>
Jumlah investasi jangka panjang	<u>9.218</u>	<u>8.653</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)**

10. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan

Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan investasi jangka panjang dalam bentuk saham pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Grup tidak memiliki pengaruh signifikan dalam perusahaan *start-up* tersebut.

Investasi pada ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk investasi pada:

- (i) Investasi pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. ("GOTO") oleh Telkomsel. Per tanggal 30 Juni 2023, Telkomsel menilai nilai wajar investasi di GOTO dengan menggunakan nilai pasar saham GOTO sebesar Rp110 per saham. Jumlah keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi Telkomsel pada GOTO pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp451 miliar dan disajikan sebagai keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.
- (ii) Investasi MDI pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Penambahan investasi pada periode berjalan oleh MDI sebesar Rp203 miliar.

Investasi pada obligasi konversi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Telkomsel dan MDI dalam bentuk obligasi konversi pada berbagai perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang informasi dan teknologi, yang akan langsung dikonversi menjadi saham ketika jatuh tempo.

b. Investasi jangka panjang pada entitas asosiasi

Investasi pada entitas asosiasi termasuk investasi pada:

- (i) Jalin sebelumnya adalah entitas anak, pada tanggal 19 Juni 2019, Grup menjual 67,00% kepemilikan sahamnya sehingga kepemilikan pada Jalin sebesar 33,00%.
- (ii) PT Fintek Karya Nusantara ("Finarya") sebesar 24,83%. Finarya sebelumnya adalah entitas anak Telkomsel. Kemudian sejak tahun 2019, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada Finarya oleh berbagai investor, maka Finarya menjadi entitas asosiasi Telkomsel.
- (iii) PT Omni Inovasi Indonesia Tbk. ("Omni Inovasi Indonesia") (sebelumnya PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.) sebesar 24,00%. Sejak tahun 2019 manajemen telah mengakui penurunan nilai penuh atas investasi pada PT Omni Inovasi Indonesia Tbk.

Bagian kumulatif rugi atas investasi pada lain-lain yang tidak diakui hingga periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp356 miliar dan Rp188 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)**

11. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi/ Translasi</u>	<u>30 Juni 2023</u>
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	1.838	27	-	(2)	1.863
Bangunan	18.947	175	(5)	(98)	19.019
Renovasi bangunan sewa	1.571	22	(10)	(15)	1.568
Peralatan sentral telepon	20.083	257	(12)	252	20.580
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.583	-	-	-	1.583
Peralatan dan instalasi transmisi	171.106	3.054	(755)	3.362	176.767
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	10.804	37	-	(50)	10.791
Jaringan kabel	74.695	1.966	(3)	1.100	77.758
Catu daya	23.276	262	(171)	(114)	23.253
Peralatan pengolahan data	20.954	365	(319)	542	21.542
Peralatan telekomunikasi lainnya	10.402	421	-	(24)	10.799
Peralatan kantor	2.625	35	(15)	(139)	2.506
Kendaraan	605	47	(13)	-	639
Peralatan lainnya	51	1	-	1	53
Aset dalam pembangunan	4.598	8.371	-	(6.045)	6.924
Jumlah	<u>363.138</u>	<u>15.040</u>	<u>(1.303)</u>	<u>(1.230)</u>	<u>375.645</u>
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Bangunan	6.228	311	-	(79)	6.460
Renovasi bangunan sewa	1.207	72	(10)	(30)	1.239
Peralatan sentral telepon	14.100	1.019	(11)	(24)	15.084
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.582	-	-	-	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	97.335	5.933	(572)	(15)	102.681
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	6.041	346	-	(45)	6.342
Jaringan kabel	22.510	1.576	(3)	347	24.430
Catu daya	16.890	910	(164)	(543)	17.093
Peralatan pengolahan data	15.490	993	(319)	(112)	16.052
Peralatan telekomunikasi lainnya	6.067	857	-	(24)	6.900
Peralatan kantor	2.073	136	(15)	(192)	2.002
Kendaraan	242	27	(7)	-	262
Peralatan lainnya	44	2	-	1	47
Jumlah	<u>189.809</u>	<u>12.182</u>	<u>(1.101)</u>	<u>(716)</u>	<u>200.174</u>
Nilai buku bersih	<u><u>173.329</u></u>				<u><u>175.471</u></u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2022
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	1.821	10	-	7	1.838
Bangunan	17.296	778	(1)	874	18.947
Renovasi bangunan sewa	1.477	80	(86)	100	1.571
Peralatan sentral telepon	18.324	1.066	(130)	823	20.083
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.583	-	-	-	1.583
Peralatan dan instalasi transmisi	165.621	4.494	(9.501)	10.492	171.106
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	10.528	155	(5)	126	10.804
Jaringan kabel	67.559	7.807	(9)	(662)	74.695
Catu daya	22.035	433	(719)	1.527	23.276
Peralatan pengolahan data	19.258	877	(390)	1.209	20.954
Peralatan telekomunikasi lainnya	9.121	1.261	-	20	10.402
Peralatan kantor	2.352	157	(85)	201	2.625
Kendaraan	537	100	(165)	133	605
Peralatan lainnya	47	2	(3)	5	51
Aset dalam pembangunan	2.950	16.936	-	(15.288)	4.598
Jumlah	<u>340.509</u>	<u>34.156</u>	<u>(11.094)</u>	<u>(433)</u>	<u>363.138</u>
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Bangunan	5.537	632	(1)	60	6.228
Renovasi bangunan sewa	1.163	130	(86)	-	1.207
Peralatan sentral telepon	12.225	1.985	(127)	17	14.100
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	1.582	-	-	-	1.582
Peralatan dan instalasi transmisi	94.532	12.087	(9.362)	78	97.335
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	5.199	830	(5)	17	6.041
Jaringan kabel	18.735	4.388	(9)	(604)	22.510
Catu daya	15.874	1.699	(712)	29	16.890
Peralatan pengolahan data	14.130	1.806	(388)	(58)	15.490
Peralatan telekomunikasi lainnya	4.330	1.717	-	20	6.067
Peralatan kantor	1.866	261	(79)	25	2.073
Kendaraan	270	38	(135)	69	242
Peralatan lainnya	40	3	(2)	3	44
Jumlah	<u>175.483</u>	<u>25.576</u>	<u>(10.906)</u>	<u>(344)</u>	<u>189.809</u>
Nilai buku bersih	<u>165.026</u>				<u>173.329</u>

a. Laba dari penjualan aset tetap

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Hasil penjualan aset tetap	24	296
Nilai buku bersih	(5)	(109)
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	<u>19</u>	<u>187</u>

b. Lain-lain

- (i) Selama tahun 2022, UPK yang menghasilkan proyeksi arus kas masuk adalah sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lainnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK tersebut pada tanggal 31 Desember 2022.
- (ii) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan sejumlah Rp63 miliar dan Rp25 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi berkisar antara 2,50%-7,62% dan 4,20%-5,54% masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022.
- (iii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk periode enam bulan pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (iv) Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp151 miliar dan Rp135 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan lain-lain - bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp151 miliar dan Rp122 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

b. Lain-lain (lanjutan)

- (v) Pada tahun 2022, umur manfaat menara yang dimiliki oleh Grup diubah dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan estimasi untuk tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp93 miliar dan Rp373 miliar. Menara disajikan sebagai bagian dari peralatan dan instalasi transmisi.
- (vi) Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp6 miliar akan ditukarkan, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp909 miliar telah ditukarkan dengan peralatan PT ZTE Indonesia. Tidak ada penyisihan atas penurunan nilai aset tersedia untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.
- (vii) Di tahun 2021, Perusahaan memutuskan untuk menghentikan penggunaan aset MSAN dan melakukan percepatan penyusutan aset MSAN yang telah terdepresiasi penuh pada tahun 2022. Dampak percepatan penyusutan aset MSAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.494 miliar. Aset MSAN disajikan sebagai bagian dari jaringan kabel.
- (viii) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 8-50 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2071. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (ix) Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp168.190 miliar dan Rp172.112 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan masing-masing sebesar Rp33.452 miliar dan Rp36.319 miliar, HKD10 juta, SGD373 juta, dan MYR72 juta dan MYR54 juta dan *first loss basis* masing-masing sebesar Rp2.750 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
- (x) Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah masing-masing sekitar 78,16% dan 55,91% dari nilai kontrak dengan perkiraan penyelesaian masing-masing sampai Desember 2025 dan Agustus 2025. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel, dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (xi) Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 19b). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp17.706 miliar dan Rp18.370 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18a dan 19c).
- (xii) Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp77.710 miliar dan Rp67.979 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (xiii) Pada tahun 2022, nilai wajar tanah dan bangunan Grup masing-masing sebesar Rp49.014 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

12. ASET HAK-GUNA

Nilai tercatat aset hak-guna yang diakui dan mutasi selama periode berjalan:

	Tanah	Bangunan	Peralatan dan instalasi transmisi	Kendaraan	Lain-lain	Jumlah
Saldo, 1 Januari 2022	4.002	729	13.120	410	208	18.469
Penambahan	1.169	121	8.205	488	23	10.006
Pengurangan dan reklasifikasi	(217)	17	(2.399)	(197)	8	(2.788)
Beban penyusutan	(867)	(204)	(4.067)	(178)	(35)	(5.351)
Saldo, 31 Desember 2022	4.087	663	14.859	523	204	20.336
Penambahan	661	44	3.968	80	2	4.755
Pengurangan dan reklasifikasi	(29)	(23)	(1.722)	(105)	0	(1.879)
Beban penyusutan	(474)	(81)	(1.828)	(139)	(17)	(2.539)
Saldo, 30 Juni 2023	4.245	603	15.277	359	189	20.673

Nilai tercatat liabilitas sewa dan rincian mutasinya adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo, 1 Januari	18.661	16.387
Akrualisasi bunga	456	931
Penambahan (Catatan 39a)	4.755	10.006
Pengurangan	(5.380)	(8.663)
Saldo	18.492	18.661
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.235)	(4.925)
Bagian jangka panjang	13.257	13.736

Jatuh tempo pembayaran liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>
Kurang dari 1 tahun	5.953
1-5 tahun	8.464
Lebih dari 5 tahun	6.699
Jumlah pembayaran sewa	21.116
Bunga	(2.624)
Nilai kini atas pembayaran sewa	18.492
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.235)
Bagian jangka panjang	13.257

Grup menyewa beberapa aset termasuk tanah, bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, kendaraan, dan lain-lain yang digunakan dalam operasi, yang pada umumnya memiliki masa sewa antara 1 dan 33 tahun.

Grup juga memiliki sewa tertentu dengan jangka waktu dua belas bulan atau kurang dan nilai sewa bernilai rendah. Grup menerapkan 'sewa jangka pendek' dan 'sewa aset bernilai rendah' sebagai pengecualian untuk sewa ini. Tidak ada kontrak sewa dengan pembayaran sewa variabel.

Rincian beban terkait sewa selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban penyusutan	2.539	2.540
Beban sewa jangka pendek	1.626	1.398
Beban bunga sewa	456	375
Beban sewa aset bernilai rendah	24	31

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian dari aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Izin penggunaan frekuensi dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 35c.i)	2.184	1.291
Beban dibayar di muka	980	446
Tagihan restitusi pajak - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 27b)	910	621
Uang muka	503	781
Uang jaminan	128	144
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	328	340
Jumlah	5.033	3.623

14. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	Goodwill	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2023	1.492	19.779	620	1.491	23.382
Penambahan	-	1.067	13	4	1.084
Pengurangan	-	(372)	(130)	-	(502)
Reklasifikasi/translasi	-	(21)	(11)	(3)	(35)
Saldo, 30 Juni 2023	1.492	20.453	492	1.492	23.929
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2023	(402)	(13.616)	(152)	(910)	(15.080)
Beban amortisasi	-	(1.074)	(27)	(45)	(1.146)
Pengurangan	-	371	2	-	373
Reklasifikasi/translasi	-	17	9	3	29
Saldo, 30 Juni 2023	(402)	(14.302)	(168)	(952)	(15.824)
Nilai buku bersih	1.090	6.151	324	540	8.105

	Goodwill	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2022	1.492	17.458	174	1.512	20.636
Penambahan	-	2.527	440	49	3.016
Pengurangan	-	(175)	-	(70)	(245)
Reklasifikasi/translasi	-	(31)	6	-	(25)
Saldo, 31 Desember 2022	1.492	19.779	620	1.491	23.382
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai :					
Saldo, 1 Januari 2022	(402)	(11.714)	(125)	(889)	(13.130)
Beban amortisasi	-	(2.063)	(26)	(91)	(2.180)
Pengurangan	-	175	-	70	245
Reklasifikasi/translasi	-	(14)	(1)	-	(15)
Saldo, 31 Desember 2022	(402)	(13.616)	(152)	(910)	(15.080)
Nilai buku bersih	1.090	6.163	468	581	8.302

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

14. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

- (i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* PT Bina Data Mandiri (“BDM”) (2012), Contact Centres Australia Pty. Ltd. (2014), MNDG (2015), Melon dan PT Griya Silkindo Drajatmoerni (“GSDm”) (2016), TSGN dan Nutech (2017), SSI, CIP, dan Telin Malaysia (2018), PST (2019), dan Digiserve (2021).
- (ii) Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing 1-6 tahun. Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari “Beban penyusutan dan amortisasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- (iii) Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp9.921 miliar dan Rp9.640 miliar.

15. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	245	262
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	288	169
Sub-jumlah	<u>533</u>	<u>431</u>
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	10.625	14.453
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	2.933	2.231
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan, dan Kewajiban Pelayanan Universal (“KPU”)	1.279	1.342
Sub-jumlah	<u>14.837</u>	<u>18.026</u>
Jumlah	<u><u>15.370</u></u>	<u><u>18.457</u></u>

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rupiah	13.165	16.727
Dolar A.S.	2.157	1.636
Lain-lain	48	94
Jumlah	<u><u>15.370</u></u>	<u><u>18.457</u></u>

Syarat dan ketentuan atas utang usaha di atas:

- a. Utang usaha tidak dikenakan bunga dan secara umum diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun.
- b. Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi pihak berelasi.
- c. Lihat Catatan 37b.v untuk manajemen risiko likuiditas Grup.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi Umum, administrasi, dan pemasaran	8.410	8.183
Gaji dan tunjangan	2.706	3.067
Beban bunga dan administrasi bank	2.393	4.014
	208	181
Jumlah	13.717	15.445

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

17. LIABILITAS KONTRAK

a. Liabilitas kontrak jangka pendek

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Uang muka pelanggan <i>Mobile</i>	4.292	3.577
Uang muka pelanggan WIB	1.454	1.188
Uang muka pelanggan <i>Enterprise</i>	1.034	1.126
Uang muka pelanggan <i>Consumer</i>	248	233
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	161	171
Jumlah	7.189	6.295

b. Liabilitas kontrak jangka panjang

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Uang muka pelanggan <i>Consumer</i>	842	844
Uang muka pelanggan WIB	562	700
Uang muka pelanggan <i>Enterprise</i>	60	17
Jumlah	1.464	1.561

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Saldo terutang	
	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Pihak berelasi		
Bank Mandiri	7.767	3.483
BNI	2.028	979
BRI	1.000	-
Sub-jumlah	10.795	4.462
Pihak ketiga		
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	1.731	1.836
MUFG Bank ("MUFG")	1.059	1.349
Bank of China	1.000	-
PT Bank DBS Indonesia ("DBS")	475	475
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	69	69
Sub-jumlah	4.334	3.729
Jumlah	15.129	8.191

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Total fasilitas (dalam miliar)*	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
Mandiri						
2018 - 2022	Telkomsel ^a , Nutech, Mitratel	8.100	26 Juli 2023 - 10 Mei 2024	Bulanan, Kuartalan	3,85% - 9,00%	Piutang usaha dan aset tetap
2020	Finnet	500	20 Juli 2023	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,30%	Tidak ada
BNI						
2014 - 2022	Perusahaan GSD, Sigma ^b	3.350	26 September 2023 - 9 Januari 2024	Bulanan	5,70% - 8,50%	Piutang usaha dan aset tetap
2017 - 2021	Metranet, Telkom Infra, Infomedia ^c	1.135	18 Februari 2024 - 6 Juni 2024	Bulanan	1 bulan JIBOR + 2,00% - 2,50%	Piutang usaha
BRI						
2022	Perusahaan	2.000	7 September 2023	Bulanan	5,70%	Tidak ada
HSBC						
2014	Sigma ^{d,f}	400	17 November 2023	Bulanan	Under BLR 7,40%	Piutang usaha
2018 - 2019	Sigma ^e , Metra, PINS, Metranet, Telkomsat, GSD	2.053	31 Oktober 2023 - 31 Januari 2024 -	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 0,80% 3 bulan JIBOR + 1,00%	Tidak ada
MUFG Bank						
2018 - 2019	Infomedia, Metra, GSD, Telkom Infra	1.430	31 Oktober 2023	Bulanan	1 bulan JIBOR + 0,70%	Tidak ada
Bank of China						
2020	Perusahaan	1.000	23 Oktober 2023	Kuartalan	3 bulan JIBOR - 1,50%	Tidak ada
DBS						
2018	Telkom Infra, Infomedia	475	31 Juli 2023	Bulanan	1 bulan JIBOR + 1,20%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal.

** Lihat Catatan 5 dan Catatan 11 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijamin.

^a Berdasarkan amendemen terakhir tanggal 5 Mei 2023.

^b Berdasarkan amendemen terakhir tanggal 28 Juli 2022 dan 6 Januari 2023.

^c Berdasarkan amendemen terakhir tanggal 28 Maret 2018 dan 6 Juli 2018.

^d Berdasarkan amendemen terakhir tanggal 16 Juli 2018, 17 November 2021 dan 7 November 2022.

^e Berdasarkan amendemen terakhir tanggal 23 April 2021.

^f Perpanjangan otomatis jika belum dilunasi.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya batasan bahwa Perusahaan harus memiliki kepemilikan saham mayoritas paling sedikit 51% terhadap anak perusahaan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 30 Juni 2023, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha.

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	19a	93	118
Utang bank	19c	13.290	7.788
Pinjaman lainnya	19d	843	952
Jumlah		14.226	8.858

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	19a	41	91
Obligasi	19b	4.793	4.793
Utang bank	19c	21.669	22.085
Pinjaman lainnya	19d	-	362
Jumlah		26.503	27.331

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2024	2025	2026	2027	
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	19a	41	41	-	-	-	-
Obligasi	19b	4.793	-	2.099	-	-	2.694
Utang bank	19c	21.669	3.299	6.127	4.904	2.845	4.494
Pinjaman lainnya	19d	-	-	-	-	-	-
Jumlah		26.503	3.340	8.226	4.904	2.845	7.188

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

	Kreditur	Mata uang	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
			Saldo terutang		Saldo terutang	
			Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri		Yen	1.152	120	1.536	181
		Rp	-	14	-	28
Jumlah				134		209
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18b)				(93)		(118)
Bagian jangka panjang				41		91

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
	Rp	Semesteran	Semesteran	7,125%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1, 2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perusahaan telah memenuhi ketentuan rasio-rasio tersebut di atas.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi

	Saldo terutang	
	30 Juni 2023	31 Desember 2022
2015		
Seri B	2.100	2.100
Seri C	1.200	1.200
Seri D	1.500	1.500
Jumlah	4.800	4.800
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(7)	(7)
Bagian jangka panjang	4.793	4.793

Tahun 2015

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 11b.xi). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW"), PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata. Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *broadband, backbone, metro network, regional metro junction, information technology application and support*, dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 30 Juni 2023, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh Pefindo adalah idAAA (*Triple A*).

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
- (b) *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
- (c) *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perusahaan telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	6.826	-	5.472
Bank Mandiri	Rp	-	3.817	-	4.381
BSI	Rp	-	2.016	-	22
BRI	Rp	-	1.182	-	1.409
Sub-jumlah			13.841		11.284
Pihak ketiga					
BCA	Rp	-	9.478	-	9.757
Bank Sindikasi	Rp	-	2.500	-	680
	US\$	14	205	17	265
Bank CIMB Niaga	Rp	-	2.174	-	2.221
	US\$	4	59	4	61
DBS	Rp	-	1.500	-	1.500
Bank Permata	Rp	-	1.417	-	1.021
Bank of China	Rp	-	1.000	-	1.000
BJB	Rp	-	1.000	-	-
HSBC	Rp	-	688	-	750
MUFG Bank	Rp	-	500	-	500
Bank Danamon	Rp	-	364	-	455
PT Bank ANZ Indonesia ("Bank ANZ")	Rp	-	154	-	198
UOB Singapore	US\$	9	128	13	205
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	Rp	-	25	-	60
	MYR	9	29	10	34
Sub-jumlah			21.221		18.707
Jumlah			35.062		29.991
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(103)		(118)
			34.959		29.873
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18b)			(13.290)		(7.788)
Bagian jangka panjang			21.669		22.085

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
BNI								
2018 - 2021	GSD, Telkomsel	Rp	1.332	3	2021 - 2024	Bulanan, Kuartalan	5,75% - 8,75%	Piutang usaha
2013 - 2021	Perusahaan, GSD, TLT, Sigma, Mitratel	Rp	7.525	780	2018 - 2033	Bulanan, Kuartalan	1 bulan JIBOR + 2,25%; 3 bulan JIBOR + 1,70% - 1,85%	Piutang usaha dan aset tetap
Bank Mandiri								
2017 - 2020	Perusahaan, GSD, Mitratel	Rp	6.693	564	2019 - 2027	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50% - 1,85%	Tidak ada
BSI								
2018 - 2022	SSI, Telkomsel	Rp	2.055	6	2019 - 2024	Bulanan	5,15% - 7,50%	Tidak ada
BRI								
2017 - 2019	Perusahaan	Rp	2.500	227	2019 - 2026	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,70% - 1,85%	Tidak ada

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)**

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)*	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)*	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan**
BCA								
2022	Telkomsel	Rp	1.500	-	2022 - 2023	Bulanan	6.05%	Tidak ada
2020 - 2022	Perusahaan, Mitratel, PST, GSD	Rp	15.986	1.008	2020 - 2030	Kuartalan, Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,50%	Piutang usaha dan aset tetap
Bank Sindikasi								
2022	Mitratel	Rp	2.500	0	2024 - 2030	Semesteran	7.68%	Tidak ada
2018	Telin	US\$	0	0	2019 - 2025	Semesteran	6 bulan SOFR + 1,25%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga								
2019 - 2022	GSD, PINS, Mitratel	Rp	2.500	47	2020 - 2029	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,30% - 1,95%	Tidak ada
2021 - 2022	Telin	US\$	0	-	2024 - 2030	Semesteran	6 bulan SOFR + 1,82%	Tidak ada
DBS								
2021	Mitratel	Rp	3.500	-	2023 - 2028	Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,70%	Aset tetap
Bank Permata								
2020 - 2022	Mitratel	Rp	2.000	104	2021 - 2029	Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,30% - 1,50%	Aset tetap
Bank of China								
2019	Telkomsel	Rp	1.000	1.000	2021 - 2023	Kuartalan	5.01%	Tidak ada
BJB								
2023	Telkomsel	Rp	1.000	-	2023 - 2023	Bulanan	5.90%	Tidak ada
HSBC								
2021	Mitratel	Rp	750	62	2023 - 2028	Semesteran	3 bulan JIBOR + 1,50%	Aset tetap
MUFG Bank								
2021	Mitratel	Rp	500	-	2022 - 2028	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,60%	Tidak ada
Bank Danamon								
2022	Mitratel	Rp	636	91	2022 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Tidak ada
ANZ								
2015	GSD, PINS	Rp	740	44	2020 - 2025	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,40% - 2,00%	Tidak ada
UOB Singapore								
2018	Telin	US\$	0	0	2019 - 2024	Semesteran	6 bulan SOFR + 1,25%	Tidak ada

* Disajikan dalam mata uang asal

** Lihat Catatan 5 dan Catatan 11 untuk piutang usaha dan aset tetap yang dijaminan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup telah memperoleh persetujuan (*waiver*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut untuk Metra, Sigma, GSD, dan TLT. *Waiver* dari HSBC, Bank DBS, BNI, dan Bank Mandiri diterima masing-masing pada tanggal 19 Desember 2022, 22 Desember 2023, 23 Desember 2023, 29 Desember 2022, dan 26 Desember 2022. Pada tanggal 30 Juni 2023, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis usaha dan keperluan investasi.

d. Pinjaman lainnya

Kreditur	Saldo terutang	
	30 Juni 2023	31 Desember 2022
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("Sarana Multi Infrastruktur")	844	1.315
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1)	(1)
Jumlah	843	1.314
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18b)	(843)	(952)
Bagian jangka panjang	-	362

Informasi lain yang signifikan terkait pinjaman lainnya pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata Uang	Total fasilitas (dalam miliar)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliar)	Jadwal pembayaran	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Sarana Multi Infrastruktur							
14 November 2018	Perusahaan	Rp	1.000	110	Semesteran (2019 - 2023)	3 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
29 Maret 2019*	Perusahaan	Rp	2.836	350	Semesteran (2020 - 2024)	3 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada
29 Maret 2019*	Telkomsat	Rp	164	12	Semesteran (2020 - 2024)	3 bulan JIBOR + 1,75%	Tidak ada

* Berdasarkan amendemen terakhir tanggal 15 Juni 2020.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan dan Telkomsat diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, di antaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (a) *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1
- (b) *Net Debt to EBITDA* tidak lebih dari 4:1
- (c) *Debt service coverage* minimal 125%

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perusahaan dan Telkomsat telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	7.261	10.535
Mitratel	8.842	9.038
Lain-lain	402	431
Jumlah	<u>16.505</u>	<u>20.004</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) periode berjalan entitas anak:		
Telkomsel	3.764	3.986
Mitratel	288	251
Lain-lain	13	8
Jumlah	<u>4.065</u>	<u>4.245</u>

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel dan Mitratel. Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel masing-masing adalah sebesar 35,00% dan 35,00% dan Mitratel sebesar 28,15% dan 28,15%.

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dan Mitratel disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

	<u>Telkomsel</u>		<u>Mitratel</u>	
	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Aset lancar	12.715	16.290	6.313	7.886
Aset tidak lancar	85.520	84.701	50.477	48.185
Liabilitas jangka pendek	(40.311)	(32.241)	(10.514)	(10.200)
Liabilitas jangka panjang	(37.255)	(38.708)	(13.213)	(12.064)
Jumlah ekuitas	<u>20.669</u>	<u>30.042</u>	<u>33.063</u>	<u>33.807</u>
Yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	13.408	19.507	24.220	24.769
Kepentingan nonpengendali	7.261	10.535	8.843	9.038

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

20. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material (lanjutan)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

	Telkomsel		Mitratel	
	2023	2022	2023	2022
Pendapatan	44.009	43.586	4.130	3.726
Beban operasi	(29.784)	(28.685)	(2.349)	(2.175)
Beban lain-lain - bersih	(521)	(938)	(673)	(534)
Laba sebelum pajak penghasilan	13.704	13.963	1.108	1.017
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.968)	(2.562)	(85)	(126)
Laba periode berjalan	10.736	11.401	1.023	891
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - bersih	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	10.736	11.401	1.023	891
Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	3.764	3.986	288	251
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	7.037	7.218	497	272

Ringkasan laporan arus kas:

	Telkomsel		Mitratel	
	2023	2022	2023	2022
Kegiatan operasi	15.884	21.759	3.384	4.384
Kegiatan investasi	(5.560)	(5.712)	(2.952)	(1.068)
Kegiatan pendanaan	(13.007)	(16.090)	(2.958)	(5.427)
Penurunan bersih kas dan setara kas	(2.683)	(43)	(2.526)	(2.111)

21. MODAL SAHAM

Keterangan	30 Juni 2023		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	3.880.154.380	3,92	195
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	5.482.255	0	0
Bogi Witjaksono	3.676.500	0	0
Afriwandi	3.719.000	0	0
Heri Supriadi	3.716.500	0	0
FM Venusiana R	7.353.000	0	0
Herlan Wijanarko	3.719.000	0	0
Muhamad Fajrin Rasyid	3.676.500	0	0
Budi Setyawan Wijaya	3.951.500	0	0
Honesti Basyir	240.004	0	0
Komisaris (Catatan 1b):			
Isa Rachmatarwata	1.751.700	0	0
Marcelino Rumambo Pandin	1.751.700	0	0
Ismail	1.751.700	0	0
Arya Mahendra Sinulingga	1.799.200	0	0
Rizal Mallarangeng	1.751.700	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	43.535.368.401	43,99	2.178
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2022		Jumlah modal disetor
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	
Saham seri A Dwiwarna Pemerintah	1	0	0
Saham seri B Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	3.889.668.580	3,93	194
Direksi (Catatan 1b):			
Ririek Adriansyah	1.156.955	0	0
Budi Setyawan Wijaya	275.000	0	0
Afriwandi	42.500	0	0
Herlan Wijanarko	42.500	0	0
Heri Supriadi	40.000	0	0
Komisaris (Catatan 1b):			
Arya Mahendra Sinulingga	87.500	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	43.568.550.005	43,98	2.179
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953

*The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

22. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	8.358	8.358
Selisih kurs karena penjabaran	771	910
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	6	6
Komponen ekuitas lainnya	37	37
Jumlah	9.558	9.697

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

23. PENDAPATAN

Grup memperoleh pendapatan dari lini produk utama sebagai berikut:

2023	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon						
Selular	4.950	-	-	81	-	5.031
Telepon tidak bergerak	-	334	285	59	-	678
Jumlah pendapatan telepon	4.950	334	285	140	-	5.709
Pendapatan interkoneksi	143	-	-	4.320	-	4.463
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	35.209	-	-	-	-	35.209
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	78	3.669	1.090	-	4.837
SMS	1.782	-	15	-	-	1.797
Lain-lain	31	-	978	476	99	1.584
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	37.022	78	4.662	1.566	99	43.427
Pendapatan jaringan	2	-	594	620	-	1.216
Pendapatan Indihome	-	12.847	1.542	-	-	14.389
Layanan lainnya						
Call center service	-	-	660	-	-	660
Manage service dan terminal	-	-	433	1	-	434
E-health	-	-	354	-	-	354
E-payment	3	-	236	-	-	239
Lain-lain	49	21	513	159	492	1.234
Jumlah layanan lainnya	52	21	2.196	160	492	2.921
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	42.169	13.280	9.279	6.806	591	72.125
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	1.353	-	1.353
Jumlah pendapatan	42.169	13.280	9.279	8.159	591	73.478
Penyesuaian dan eliminasi	-	3	5	(3)	(402)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	42.169	13.283	9.284	8.156	189	-

2022	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Pendapatan konsolidasian
Pendapatan telepon						
Selular	6.207	-	-	18	-	6.225
Telepon tidak bergerak	-	393	304	92	-	789
Jumlah pendapatan telepon	6.207	393	304	110	-	7.014
Pendapatan interkoneksi	133	-	-	4.089	-	4.222
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika						
Internet dan data seluler	33.196	-	-	-	-	33.196
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	-	196	3.413	1.114	-	4.723
SMS	2.281	-	22	-	-	2.303
Lain-lain	-	-	796	406	101	1.303
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	35.477	196	4.231	1.520	101	41.525
Pendapatan jaringan	2	-	661	434	-	1.097
Pendapatan Indihome	-	12.460	1.371	-	-	13.831
Layanan lainnya						
Call center service	-	-	531	24	-	555
Manage service dan terminal	-	-	550	9	-	559
E-health	-	-	341	-	-	341
E-payment	-	-	165	-	-	165
Lain-lain	-	32	542	194	383	1.151
Jumlah layanan lainnya	-	32	2.129	227	383	2.771
Jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	41.819	13.081	8.696	6.380	484	70.460
Pendapatan dari transaksi lessor	-	-	-	1.523	-	1.523
Jumlah pendapatan	41.819	13.081	8.696	7.903	484	71.983
Penyesuaian dan eliminasi	-	(6)	5	(2)	(375)	-
Pendapatan eksternal sesuai yang disajikan di segmen operasi	41.819	13.075	8.701	7.901	109	-

Manajemen mengharapkan bahwa sebagian besar transaksi yang dialokasikan untuk kontrak yang belum diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2023 akan diakui sebagai pendapatan selama periode-periode pelaporan berikutnya. Kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi pada tanggal 30 Juni 2023, bagian yang diharapkan dapat direalisasi dalam satu tahun adalah sebesar Rp6.244 miliar dan bagian yang lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp3.449 miliar.

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa yang tidak dapat dibatalkan sebagai lessor. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan. Sewa ini memiliki jangka waktu antara 1 hingga 10 tahun. Semua sewa termasuk klausul untuk memungkinkan revisi atas biaya sewa setiap tahun sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Penyewa juga diharuskan untuk memberikan jaminan nilai residu pada properti yang disewa.

Tidak ada pendapatan dari pelanggan utama yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022.

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

24. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gaji dan tunjangan	4.999	4.808
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	1.780	1.694
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 30)	904	923
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 31)	142	87
Lain-lain	19	14
Jumlah	<u>7.844</u>	<u>7.526</u>

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

25. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Operasi dan pemeliharaan	11.254	10.739
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 35c.i)	3.674	3.210
Sewa sirkuit dan <i>Customer Premise Equipment</i> ("CPE")	1.501	1.263
Beban hak penyelenggaraan dan KPU (Catatan 15)	1.312	1.262
Listrik, gas, dan air	441	451
Beban pokok penjualan kartu SIM, voucher, dan periferal (Catatan 7)	349	350
Manajemen proyek	263	224
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	149	166
Asuransi	126	101
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	101	81
Jumlah	<u>19.170</u>	<u>17.847</u>

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban umum	1.192	1.087
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	859	705
Jasa profesional	333	314
Perjalanan	207	164
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	161	128
Rapat	153	119
Sumbangan sosial	125	101
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	301	202
Jumlah	<u>3.331</u>	<u>2.820</u>

Lihat Catatan 32 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

27. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Perusahaan:		
Pajak penghasilan ("PPH")		
Pasal 22 - Pembelian barang	-	1
Pasal 23 - Penyerahan jasa	-	97
PPN	-	-
Entitas anak:		
PPH		
PPH Badan	71	3
Pasal 4(2) - Pajak final	49	24
Pasal 22 - Pembelian barang	2	-
Pasal 23 - Penyerahan jasa	262	16
PPN	1.975	1.323
Jumlah pajak dibayar di muka	2.359	1.464
Bagian jangka pendek	(2.359)	(1.464)
Bagian jangka panjang (Catatan 13)	-	-

b. Tagihan restitusi pajak

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Perusahaan		
PPH Badan	-	19
PPH 21	1	3
PPN	163	155
Entitas anak		
PPH		
PPH Badan	476	578
Pasal 23 - Penyerahan jasa	-	8
PPN	273	238
Jumlah tagihan restitusi pajak	913	1.001
Bagian jangka pendek	(3)	(380)
Bagian jangka panjang (Catatan 13)	910	621

c. Utang pajak

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Perusahaan:		
PPH		
Pasal 4(2) - Pajak final	31	50
Pasal 21 - PPh pribadi	359	79
Pasal 22 - Pembelian barang	3	7
Pasal 23 - Penyerahan jasa	34	48
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	13	190
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	1.068	5
Pasal 29 - PPh Badan	101	575
PPN	510	244
PPN atas Pemungutan Pajak ("WAPU")	181	286
	2.300	1.484
Entitas anak:		
PPH		
Pasal 4(2) - Pajak final	142	287
Pasal 21 - PPh pribadi	154	206
Pasal 22 - Pembelian barang	3	5
Pasal 23 - Penyerahan jasa	96	68
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	567	260
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	187	262
Pasal 29 - PPh Badan	994	1.782
PPN	561	493
PPN WAPU	559	525
	3.263	3.888
Jumlah utang pajak	5.563	5.372

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kini		
Perusahaan	747	1.094
Entitas anak	3.359	3.517
	<u>4.106</u>	<u>4.611</u>
Tangguhan		
Perusahaan	356	(177)
Entitas anak	19	(560)
	<u>375</u>	<u>(737)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>4.481</u>	<u>3.874</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	21.302	21.429
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	11.653	11.988
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	32.955	33.417
Dikurangi: laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(19.054)	(19.670)
Laba sebelum pajak penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan atas pajak final - Perusahaan	13.901	13.747
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(296)	(203)
Laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurangi penghasilan atas pajak final - Perusahaan	13.605	13.544
Perbedaan temporer:		
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	260	90
Pendapatan instalasi tangguhan	12	115
Sewa	(13)	8
Provisi imbalan karyawan	(353)	(674)
Hak atas tanah, aset tak berwujud dan lainnya	18	10
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(1.201)	(33)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(805)	939
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	30	37
Biaya kontrak	62	65
Jumlah perbedaan temporer bersih	(1.990)	557
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	121	127
Sumbangan	121	125
Imbalan karyawan	10	100
Beban untuk mendapatkan pendapatan obyek Pajak penghasilan final	97	-
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(8.223)	(8.961)
Lain-lain	20	159
Jumlah perbedaan tetap bersih	(7.854)	(8.450)
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	<u>3.761</u>	<u>5.651</u>
Beban pajak penghasilan kini	715	1.074
Beban pajak penghasilan final	32	20
Jumlah beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	747	1.094
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	3.359	3.517
Jumlah beban pajak penghasilan kini	<u>4.106</u>	<u>4.611</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 19% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	21.302	21.429
Dikurangi pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih konsolidasian	(3.195)	(2.741)
	18.107	18.688
Beban pajak penghasilan dihitung pada tarif Perusahaan	3.440	3.551
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	377	403
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	509	529
Beban pajak penghasilan final	32	15
Penyesuaian pajak tangguhan	(28)	-
Pajak tangguhan yang tidak diakui	4	-
Lain-lain	147	(624)
Beban pajak penghasilan bersih	4.481	3.874

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Bab III Pasal 3 UU HPP telah mengatur perubahan UU Pajak Penghasilan di antaranya perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022, dan bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif seharusnya.

Perusahaan telah menerapkan tarif pajak PPh Badan sebesar 19% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini di atas dalam SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2022 kepada Otoritas Pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

- e. Pemeriksaan pajak

- (i) Perusahaan

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4,1 miliar), SKPKB PPN WAPU senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55,3 miliar (termasuk denda Rp16,8 miliar). Perusahaan juga menerima STP atas PPN senilai Rp34 miliar, PPN WAPU senilai Rp7 miliar, dan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar.

Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan senilai Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar yang sebelumnya dilaporkan pada SPT PPh Badan tahun 2015 ke SPT PPh Badan tahun 2016.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPh dan PPN Tahun 2015 (lanjutan)

Perusahaan juga menerima ketetapan kurang bayar PPN, kurang bayar PPN WAPU, serta STP PPN WAPU senilai Rp26 miliar. Bagian yang telah diterima telah dibebankan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017. Atas bagian yang tidak disetujui, pada tanggal 24 Juli 2017 Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Otoritas Pajak atas SKPLB PPh Badan senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55,3 miliar.

Pada tanggal 3 dan 22 Mei 2018, Otoritas Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai Rp54,6 miliar dan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Perusahaan. Perusahaan telah menyetujui hasil proses keberatan dari Otoritas Pajak atas SKPLB PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp793 juta dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada tanggal 18 Juli 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas SKPLB PPh Badan yang menambah jumlah pajak yang masih harus diterima senilai Rp76 miliar. Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2018 Perusahaan mengajukan banding. Pada tanggal 8 Juli 2020, Perusahaan menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menerima pengembalian atas restitusi tambahan lebih bayar PPh Badan hasil putusan banding senilai Rp90,9 miliar.

Pada tanggal 26 Oktober 2020, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa DJP mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Banding atas sengketa PPh Badan tahun 2015. Pada tanggal 2 Desember 2020, Perusahaan mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagai jawaban atas permohonan peninjauan kembali tersebut. Perusahaan selanjutnya merespon dengan mengirimkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor Tel. 167/KUOOO/COP-1 0000000/2020 pada Tanggal 2 Desember 2020 ke Mahkamah Agung ("MA") melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. Keseluruhan berkas Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK (DJP) dan berkas Kontra Memori Peninjauan Kembali yang dikirimkan oleh Termohon PK (Telkom) telah diteruskan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak ke MA tanggal 13 Desember 2022 dengan surat pengantar nomor PKMA-1594/XII/PAN.Wk/2022.

Pada tanggal 25 Mei 2023, Mahkamah Agung menerbitkan Putusan nomor 1365/B/PK/Pjk/2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali DJP. Dengan demikian untuk seluruh kewajiban pajak tahun 2015 telah berkekuatan hukum tetap melalui Penerbitan Putusan MA serta telah melewati masa daluwarsa penetapan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan.

PPh dan PPN tahun 2018

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menerima SKP dan STP atas hasil pemeriksaan *all taxes* tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB PPh Badan senilai Rp101,5 miliar, SKPKB PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar (termasuk denda Rp573,9 juta), SKPKB PPh Pasal 23 senilai Rp4 juta (termasuk denda Rp1,2 juta) dan SKPLB PPN Masa Januari sampai dengan Agustus dan Oktober sampai dengan Desember senilai Rp85,3 miliar. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan SKPKB PPN Masa September senilai Rp240,5 miliar (termasuk denda Rp59,5 miliar). SKPKB PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar (termasuk denda Rp4,6 miliar) dan STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima koreksi pajak pemeriksa atas PPh Badan senilai Rp1,1 miliar, kurang bayar PPh Pasal 21 senilai Rp1,9 miliar, kurang bayar PPh 23 senilai Rp4 juta, kredit pajak PPN senilai Rp4,8 miliar, STP PPN WAPU senilai Rp1,2 miliar, kurang bayar PPN WAPU senilai Rp15,17 miliar. Koreksi yang telah disetujui telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2020.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

PPH dan PPN tahun 2018 (lanjutan)

Perusahaan tidak menyetujui koreksi pemeriksa pajak yang mengenakan PPN atas transaksi penyerahan komponen *space segment* aset dalam konstruksi (“ADK”) Satelit Merah Putih kepada TelkomSAT. Pada bulan Maret 2021, Perusahaan telah mengajukan surat keberatan pajak ke Otoritas Pajak atas koreksi pemeriksa pajak tersebut. Pada tanggal 4 Maret 2022, keberatan yang diajukan Perusahaan telah dikabulkan melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00253/KEB/PJ/WPJ.19/2022. Pada tanggal 8 April 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian senilai Rp270,4 miliar sesuai dengan Surat Keputusan tersebut. Dengan demikian, atas semua jenis pajak tahun 2018 Perusahaan telah menerima seluruh putusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

PPN tahun 2019

Pada tanggal 12 Mei 2022, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atas Lebih Bayar SPT Masa PPN Dalam Negeri Masa Januari s.d Desember 2019. Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan menerima SKPKB dan STP PPN WAPU Masa Januari sampai dengan Desember 2019 senilai Rp6,3 miliar (termasuk denda Rp3,1 miliar) serta SKPLB PPN Dalam Negeri Masa Januari sampai dengan Desember 2019 senilai Rp60,8 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima koreksi pajak pemeriksa dan telah melakukan pembebanan atas denda dan koreksi pemeriksaan pada laporan laba rugi tahun 2022. Dengan demikian, atas jenis pajak PPN tahun 2019 Perusahaan telah menerima putusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 12 April 2023, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPh Badan dan PPh Pemotongan/Pemungutan Tahun Pajak 2019. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, proses pemeriksaan pajak masih berlangsung.

PPN tahun 2020

Pada tanggal 1 September 2022, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atas Lebih Bayar SPT Masa PPN Dalam Negeri Masa Mei 2020. Pada tanggal 10 Maret 2023, Perusahaan telah menerima SKPKB dan STP PPN WAPU Masa Mei 2020 senilai Rp0,6 miliar (termasuk denda Rp0,3 miliar), SKPN dan STP PPN JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp0,1 miliar, dan SKPLB PPN Dalam Negeri Masa Mei 2020 senilai Rp0,3 miliar. Perusahaan setuju untuk menerima koreksi pajak pemeriksa dan telah melakukan pembebanan atas denda dan koreksi pemeriksaan pada laporan laba rugi tahun 2023.

Pada tanggal 13 Maret 2023, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atas Lebih Bayar SPT Masa PPN Dalam Negeri Masa Januari sampai dengan April, Juli, September dan November sampai dengan Desember 2020. Pada tanggal 20 Juni 2023, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPh Badan, PPN dan PPh Pemotongan/Pemungutan Tahun Pajak 2020. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, proses pemeriksaan atas seluruh jenis pajak masih berlangsung.

PPN dan PPh tahun 2021

Pada tanggal 20 Juni 2023, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPh Badan, PPN dan PPh Pemotongan/Pemungutan Tahun Pajak 2021. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, proses pemeriksaan pajak masih berlangsung.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel

PPH dan PPN Tahun 2014

Pada Mei 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2014 senilai Rp150,6 miliar (termasuk denda Rp54,6 miliar). Telkomsel menerima atas bagian senilai Rp16,5 miliar dan telah mencatat sebagai beban dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2019. Telkomsel juga telah membayar sebesar Rp99,1 miliar dan mencatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada Agustus 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp134,1 miliar.

Pada Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menerima sebesar Rp27,2 miliar dan menolak keberatan sebesar Rp106,8 miliar. Pada Agustus 2020, Telkomsel menerima restitusi pajak sebesar Rp27,2 miliar. Pada September 2020, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2014.

Pada bulan April dan Mei 2022, Telkomsel menerima Putusan Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPh dan PPN tahun 2014 yang menerima sepenuhnya banding Telkomsel sebesar Rp66 miliar. Telkomsel menerima pengembalian pajak pada bulan Mei dan Juni 2022, dan membebaskan bagian yang ditolak tersebut sebesar Rp3,6 miliar sebagai beban pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2022.

Pada bulan Agustus 2022, Telkomsel menerima pemberitahuan bahwa Otoritas Pajak telah mengajukan Peninjauan Kembali ke MA atas PPN tahun 2014 sebesar Rp8 miliar. Telkomsel telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada September 2022.

Pada bulan Januari, Februari dan Maret 2023, MA menolak sepenuhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Otoritas Pajak atas masa pajak PPN 2014 sebesar Rp8,23 miliar. Dengan demikian, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) dan tidak ada tambahan utang pajak untuk tahun pajak 2014.

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian ini, hasil banding PPh Badan belum diterima.

PPH dan PPN Tahun 2015

Pada Agustus 2019, Telkomsel menerima SKPKB dan STP untuk tahun fiskal 2015 senilai Rp384,8 miliar (termasuk denda Rp54,6 miliar) dan telah dibayar penuh pada tanggal 28 Agustus 2019. Atas nilai tagihan sebesar Rp34,6 miliar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dan saldo tersisa senilai Rp350,2 miliar dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada September 2019, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak senilai Rp350,2 miliar.

Pada Juli 2020, Telkomsel menerima surat keputusan keberatan dari Otoritas Pajak yang menolak semua keberatan Telkomsel. Pada September 2020, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas PPh Badan, pajak penghasilan, dan PPN tahun 2015 sebesar Rp350,2 miliar.

Pada bulan April dan Mei 2022, Telkomsel menerima Putusan Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPh dan PPN tahun 2015 yang menerima sebagian banding Telkomsel sebesar Rp52,9 miliar. Telkomsel menerima pengembalian pajak pada bulan April dan Mei 2022 dan membebaskan bagian yang ditolak tersebut sebesar Rp3 miliar sebagai beban pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2022.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
 (Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada bulan Agustus 2022, Telkomsel menerima pemberitahuan bahwa Otoritas Pajak telah mengajukan uji materi ke MA atas putusan Pengadilan Pajak tentang PPN. Telkomsel mengajukan kontra memorandum untuk peninjauan kembali pada Agustus 2022.

Pada bulan Januari, Februari dan Maret 2023, MA menolak sebagian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Otoritas Pajak atas beberapa masa pajak PPN 2015 sebesar Rp19,60 miliar. Dengan demikian, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in-kracht) dan tidak ada tambahan utang pajak untuk tahun pajak 2015.

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian ini, hasil banding PPh Badan dan Peninjauan Kembali untuk sisa masa pajak PPN belum diterima.

PPh dan PPN Tahun 2018

Pada September 2022, Telkomsel menerima SKPKB dan STP atas PPN, PPN barang kena pajak dan PPh pasal 26 untuk tahun fiskal 2018 sebesar Rp159,8 miliar (termasuk denda Rp48,6 miliar). Pada tanggal yang sama, Telkomsel juga menerima SKPLB PPN atas jasa kena pajak sebesar Rp40 miliar.

Pada Oktober 2022, Telkomsel membayar dan menerima sebagian ketetapan pajak PPh Badan sebesar Rp164,79 juta dan mencatatnya sebagai beban dalam laporan laba rugi konsolidasian. Telkomsel juga membayar sisa ketetapan pajak PPh Badan dan PPN sebesar Rp57,03 miliar, setelah dikurangi lebih bayar PPN sebesar Rp40,05 miliar. Telkomsel mencatatnya sebagai tagihan restitusi pajak di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada Desember 2022, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak sebesar Rp119,54 miliar untuk PPh Badan, PPN dan PPh. Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian ini, hasil keberatan belum diterima.

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan		(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi	
	30 Juni 2023	31 Desember 2022	2023	2022
Perusahaan				
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	935	885	50	17
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala - bersih	995	981	(228)	(6)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	676	806	(130)	249
Provisi imbalan karyawan	225	292	(67)	(128)
Pendapatan instalasi tangguhan	206	203	3	22
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	26	23	3	2
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	91	85	6	7
Sewa	(4)	(1)	(3)	1
Biaya kontrak	(38)	(49)	11	12
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	3.112	3.225	(355)	176
Telkomsel				
Provisi imbalan karyawan	1.313	1.220	93	6
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian	179	144	35	16
Sewa	254	468	(214)	(176)
Pengukuran nilai wajar atas instrumen-instrumen keuangan	(7)	(7)	-	550
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.346)	(1.445)	99	119
Amortisasi lisensi	(149)	(146)	(3)	2
Instrumen-instrumen keuangan lainnya	(117)	(119)	2	41
Aset pajak tangguhan Telkomsel - bersih	127	115	12	558
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	766	777	(12)	36
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(1.029)	(1.023)	(20)	(33)
Beban (manfaat) pajak tangguhan			(375)	737
Aset pajak tangguhan - bersih	4.005	4.117		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(1.029)	(1.023)		

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)**

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp17.292 miliar dan Rp23.915 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat terealisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

Di bulan Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain mengatur tarif pajak penghasilan dan PPN. Mulai 1 Januari 2022, Grup menerapkan tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak karyawan sesuai ayat (1) huruf a Pasal 17 Bab III, serta mulai 1 April 2022 tarif PPN berubah menjadi 11%. Perusahaan memastikan kesiapan *surrounding billing system*, aspek administrasi dan legal atas transaksi, serta membangun koordinasi yang intensif antar unit yang terkait untuk mempersiapkan penerapan aturan tersebut.

Pada bulan Februari 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 9/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 51/2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Perusahaan memastikan aspek administrasi dan legal atas transaksi dan membangun koordinasi yang solid antar unit terkait untuk mempersiapkan penerapan aturan tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut.

Pada bulan Juni 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2023 tentang Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Perusahaan memastikan aspek administrasi dan legal atas transaksi, serta membangun koordinasi yang intensif antar unit yang terkait untuk mengimplementasikan aturan tersebut.

28. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp12.756 miliar dan Rp13.310 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama periode berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp128,77 dan Rp134,36 (dalam jumlah penuh) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

29. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam. S.H., M.Kn., No. 29 tertanggal 27 Mei 2022 para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2021 sebesar Rp14.856 miliar (Rp149,97 per lembar saham). Perusahaan melakukan pembayaran dividen kas pada 30 Juni 2022.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam. S.H., M.Kn., No. 73 tertanggal 30 Mei 2023 para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk tahun buku 2022 sebesar Rp16.602 miliar (Rp167,59 per lembar saham). Perusahaan melakukan pembayaran dividen kas pada 5 Juli 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	30a.i.a		
Manfaat pasti	30a.i.a.i	4.293	4.234
Manfaat tambahan	30a.i.a.ii	47	44
Perusahaan - <i>unfunded</i>	30a.i.b	521	522
Telkomsel	30a.ii	4.492	4.275
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		9.353	9.075
Imbalan kesehatan pasca kerja	30b	515	-
Imbalan pasca kerja lainnya	30c	267	268
Imbalan tunjangan masa kerja	30d	1	1
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	30e	1.006	928
Jumlah		11.142	10.272

Beban manfaat pensiun yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	30a.i.a		
Manfaat pasti	30a.i.a.i	345	378
Manfaat tambahan	30a.i.a.ii	2	0
Perusahaan - <i>unfunded</i>	30a.i.b	28	30
Telkomsel	30a.ii	312	292
Beban pensiun berkala, bersih	24	687	700
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala, bersih	24,30b	121	127
Beban imbalan pasca kerja lainnya	24,30c	11	12
Beban imbalan tunjangan masa kerja	24,30d	1	1
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	24,30e	84	83
Jumlah		904	923

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat, perubahan aset program, status pendanaan, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian serta komponen biaya dan jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

	<i>Funded</i>				Imbalan kesehatan		Jumlah
	Manfaat pasti				pasca kerja		
	Perusahaan	Telkomsel	Perusahaan	Telkomsel	Perusahaan		
	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja	Aset program kesehatan pasca kerja	
Saldo awal, 1 Januari 2023	23.136	(18.902)	5.128	(853)	12.878	(12.878)	8.509
Beban jasa	166	-	163	-	-	-	329
Beban bunga (pendapatan bunga)	803	(660)	149	-	456	(459)	289
Beban administrasi program	(65)	65	-	-	-	121	121
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	50	-	-	-	-	-	50
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	954	(595)	312	-	456	(338)	789
(Keuntungan) kerugian aktuarial atas:							
Perubahan asumsi pengalaman	113	-	-	-	(14)	-	99
Perubahan asumsi demografi	-	-	-	-	-	-	-
Perubahan asumsi keuangan	1.770	-	-	-	809	-	2.579
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	(622)	-	-	-	(314)	(936)
Penghasilan bunga dari batas atas aset	-	-	-	-	-	4	4
Perubahan pada batas atas aset	-	-	-	-	-	(88)	(88)
Jumlah yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	1.883	(622)	-	-	795	(398)	1.658
Kontribusi pemberi kerja	-	(1.511)	-	-	-	-	(1.511)
Kontribusi peserta program pensiun	9	(9)	-	-	-	-	-
Pembayaran imbalan dari aset program	(975)	975	(95)	-	-	-	(95)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(50)	-	-	-	(289)	289	(50)
Saldo akhir, 30 Juni 2023	24.957	(20.664)	5.345	(853)	13.840	(13.325)	9.300
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	4.293	-	4.492	-	515	-	9.300

	<i>Funded</i>				Imbalan kesehatan		Jumlah
	Manfaat pasti				pasca kerja		
	Perusahaan	Telkomsel	Perusahaan	Telkomsel	Perusahaan		
	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas manfaat pensiun	Aset program pensiun	Liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja	Aset program kesehatan pasca kerja	
Saldo awal, 1 Januari 2022	23.838	(18.947)	5.020	(832)	13.416	(12.778)	9.717
Beban jasa	178	-	326	-	-	-	504
Beban bunga (pendapatan bunga)	1.635	(1.347)	328	(58)	982	(933)	607
Beban administrasi program	-	63	-	-	-	164	227
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	65	-	-	-	-	-	65
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	1.878	(1.284)	654	(58)	982	(769)	1.403
(Keuntungan) kerugian aktuarial atas:							
Perubahan asumsi pengalaman	(737)	-	(1)	-	(730)	-	(1.468)
Perubahan asumsi demografi	-	-	(1)	-	-	-	(1)
Perubahan asumsi keuangan	(30)	-	(67)	-	(136)	-	(233)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	-	300	(186)	37	-	(69)	82
Perubahan pada batas atas aset	-	-	-	-	-	84	84
Jumlah yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	(767)	300	(255)	37	(866)	15	(1.536)
Kontribusi pemberi kerja	-	(719)	-	-	-	-	(719)
Kontribusi peserta program pensiun	19	(19)	-	-	-	-	-
Pembayaran imbalan dari aset program	(1.767)	1.767	(291)	-	-	-	(291)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(65)	-	-	-	(654)	654	(65)
Saldo akhir, 31 Desember 2022	23.136	(18.902)	5.128	(853)	12.878	(12.878)	8.509
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir periode	4.234	-	4.275	-	-	-	8.509

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat, perubahan aset program, status pendanaan, dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian serta komponen biaya dan jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

	Perusahaan				Perusahaan dan entitas anak	
	Unfunded	Manfaat tambahan	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan khusus masa kerja	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan	Jumlah
Saldo awal, 1 Januari 2023	522	44	268	1	928	1.763
Beban jasa	11	0	3	-	71	85
Beban bunga	17	2	8	-	3	30
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	28	2	11	-	74	115
(Laba) rugi aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(2)	3	6	-	4	11
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(27)	(2)	(18)	-	-	(47)
Saldo akhir, 30 Juni 2023	521	47	267	1	1.006	1.842

	Perusahaan				Perusahaan dan entitas anak	
	Unfunded	Manfaat tambahan	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan khusus masa kerja	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan	Jumlah
Saldo awal, 1 Januari 2022	613	-	300	4	926	1.843
Beban jasa	24	37	8	1	78	148
Beban bunga	34	-	17	-	-	51
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	58	37	25	1	78	199
(Laba) rugi aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(55)	7	(14)	-	(13)	(75)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(94)	-	(43)	(4)	(63)	(204)
Saldo akhir, 31 Desember 2022	522	44	268	1	928	1.763

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022:

	Perusahaan						Telkomsel	Perusahaan dan anak perusahaan	
	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	Unfunded	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan khusus masa kerja	Manfaat pasti	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan	Jumlah
2023									
Beban jasa	166	0	11	-	3	1	163	81	425
Beban bunga	143	2	17	(3)	8	-	149	3	319
Beban bunga pada batas atas aset	-	-	-	3	-	-	-	-	3
Beban administrasi program	-	-	-	121	-	-	-	-	121
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	50	-	-	0	-	-	-	-	50
Beban pensiun berkala bersih	359	2	28	121	11	1	312	84	918
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(14)	-	-	-	-	-	-	-	(14)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	345	2	28	121	11	1	312	84	904

	Perusahaan						Telkomsel	Perusahaan dan anak perusahaan	
	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	Unfunded	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan khusus masa kerja	Manfaat pasti	Kewajiban pensiun undang-undang ketenagakerjaan	Jumlah
2022									
Beban jasa	117	-	13	-	3	1	146	83	363
Beban bunga	160	-	17	24	9	-	146	-	356
Beban administrasi program	36	-	-	103	-	-	-	-	139
Beban tambahan manfaat kesejahteraan	65	-	-	-	-	-	-	-	65
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	378	-	30	127	12	1	292	83	923

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

(a) *Funded*

(i) Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Program pensiun ini diatur di dalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Arahannya yang ditetapkan oleh Pendiri dilaksanakan oleh Dewan Pengurus. Dewan Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan peserta.

Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Dapen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.511 miliar dan Rp719 miliar.

Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki. Perusahaan memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perusahaan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal, dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(i) Manfaat pasti (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, aset program manfaat pasti terdiri dari:

	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	1.207	-	1.320	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.707	-	1.638	-
Barang konsumen primer	510	-	505	-
Bahan baku	235	-	271	-
Infrastruktur	683	-	639	-
Energi	123	-	141	-
Teknologi	52	-	89	-
Perindustrian	373	-	315	-
Barang konsumen non-primer	115	-	115	-
Properti dan <i>real estate</i>	109	-	98	-
Kesehatan	212	-	208	-
Transportasi dan logistik	11	-	8	-
Reksadana berbasis saham	379	-	410	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	2.662	-	3.117
Obligasi pemerintah	10.007	-	7.884	-
Reksadana pendapatan tetap	-	122	-	122
<i>Midterm notes</i>	-	100	-	100
Efek beragun aset	-	18	-	30
Sukuk	-	1.130	-	1.090
Saham non-publik:				
Penempatan langsung	-	368	-	368
Properti	-	186	-	187
Lainnya	-	354	-	247
Jumlah	15.723	4.940	13.641	5.261

Aset program pensiun termasuk di dalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp349 miliar dan Rp336 miliar, yang mewakili 1,69% dan 1,78% dari total aset program pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp355 miliar dan Rp348 miliar mewakili masing-masing 1,72% dan 1,84% dari total aset per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp1.217 miliar dan Rp984 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan ("RKD") Dapen di atas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 30 Juni 2023, RKD Dapen di bawah 105% sehingga Perusahaan akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 30 September 2022, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, Perusahaan menetapkan bagi para pensiunan yang berhenti selain karena Hukuman Disiplin, Pensiun Dini, dan Atas Permintaan Sendiri dan menerima Manfaat Pensiun kurang dari Rp1 juta per bulan diberikan kenaikan Manfaat Pensiun bulanan menjadi Rp1 juta. Pada tahun 2023 dan 2022, Perusahaan memberikan manfaat kesejahteraan tambahan kepada Pensiunan dan penerima manfaat pensiun dari peserta yang memasuki masa pensiun sebelum 30 Juni 2002 masing-masing sebesar Rp50 miliar dan Rp65 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(a) *Funded* (lanjutan)

(i) Manfaat pasti (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, pada laporan masing-masing tertanggal 21 Juli 2023 dan 18 Maret 2023 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	6,50%	7,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

(ii) Manfaat Tambahan

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 30 September 2022, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, Perusahaan menyelenggarakan Program Manfaat Lain Iuran Pasti ("PMLIP") dalam bentuk Manfaat Tambahan. Peserta PMLIP berhak menerima Manfaat Pensiun Berkala tiap bulan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dana Manfaat Tambahan bersumber dari iuran Manfaat Tambahan Pemberi Kerja dan dana penyisihan hasil pengembangan investasi apabila tercapai RKD di atas 102% dan tingkat pengembalian investasi ("ROI") di atas suku bunga aktuarial untuk pendanaan. Iuran Manfaat Tambahan Pemberi Kerja untuk setiap peserta PMLIP ditetapkan sebesar Rp120 ribu untuk periode iuran 12 bulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah penerimaan.

Penilaian aktuarial untuk program Manfaat Tambahan dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, pada laporan masing-masing tertanggal 21 Juli 2023 dan 18 Maret 2023 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Tingkat diskonto	6,50%	7,25%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

Aset program untuk manfaat tambahan telah disisihkan sejak 2018 sesuai persetujuan Dewan Pengawas. Pada tanggal 30 Juni 2023, kewajiban manfaat tambahan telah dilunasi sepenuhnya kepada penerima pensiun dan tidak ada kewajiban tambahan yang disisihkan karena persyaratan pengakuan manfaat tambahan sebagaimana tersebut di atas belum terpenuhi.

(b) *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya. Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan di mana untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27 miliar dan Rp48 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. PENSIIAN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

(b) *Unfunded* (lanjutan)

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan penyeragaman bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun dihitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan penyeragaman dengan Manfaat Pensiun Sekaligus (“MPS”). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, di mana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun (“MPP”). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, di antaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Mulai tanggal 1 April 2012, karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan tanpa permohonan maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, pada laporan masing-masing tertanggal 21 Juli 2023 dan 18 Maret 2023 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Tingkat diskonto	6,50%	7,00%-7,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10%-8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi karyawannya. Berdasarkan program ini, karyawan berhak atas imbalan pensiun yang ditentukan berdasarkan gaji pokok terakhir atau gaji bersih yang diterima (tidak termasuk tunjangan fungsional) dan masa kerjanya. Program pensiun tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (“Jiwasraya”), perusahaan asuransi jiwa milik negara, melalui suatu kontrak asuransi anuitas. Hingga tahun 2004, karyawan berkontribusi pada program ini sebesar 5% dari gaji pokok bulanan mereka, sementara Telkomsel menanggung sisa besaran kontribusi yang diharuskan menurut program tersebut. Sejak tahun 2005, Telkomsel telah menanggung sepenuhnya besaran kontribusi tersebut.

Pada tanggal 23 April 2021, Telkomsel dan Jiwasraya sepakat untuk mengakhiri kontrak program asuransi tersebut dan menandatangani perjanjian restrukturisasi. Perjanjian tersebut menggantikan program manfaat dari anuitas menjadi manfaat lumpsum. Berdasarkan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan nilai tunai pada tanggal pengakhiran yang terbagi menjadi nilai tunai untuk peserta aktif dan peserta pasif masing-masing sebesar Rp857 miliar dan Rp73 miliar. Terdapat potongan 5% dari nilai tunai untuk peserta aktif, maka 95% dari Rp857 miliar (atau setara dengan Rp814 miliar) ditambah Rp73 miliar akan menjadi jumlah yang selanjutnya diambil alih oleh IFG Life pada saat perjanjian dengan IFG Life menjadi efektif dan karenanya, perjanjian restrukturisasi akan berakhir. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai tunai peserta aktif sebesar Rp853 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. PENSIIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan laporan tertanggal masing-masing 28 Februari 2023 dan 24 Maret 2022 yang dilakukan oleh KKA Halim dan Rekan, aktuaris independen yang berasosiasi dengan Milliman, dan KKA Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Tingkat diskonto	7,15%	7,00%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Telkom ("Yakes Telkom").

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes Telkom untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, aset program terdiri dari:

	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	617	-	1.085	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.379	-	1.368	-
Barang konsumen primer	440	-	114	-
Bahan baku	239	-	264	-
Infrastruktur	623	-	598	-
Energi	121	-	221	-
Teknologi	21	-	63	-
Perindustrian	290	-	185	-
Barang konsumen non-primer	116	-	457	-
Properti dan <i>real estate</i>	113	-	95	-
Kesehatan	199	-	233	-
Transportasi dan logistik	7	-	3	-
Reksadana berbasis ekuitas	600	-	1.035	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi pemerintah	850	-	82	-
Reksadana pendapatan tetap	7.267	-	6.761	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	443	-	398
Jumlah	12.882	443	12.564	398

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Aset program Yakes Telkom juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp331 miliar dan Rp228 miliar yang merupakan 2,48% dan 1,76% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022. Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp652 miliar dan Rp839 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, pada laporan masing-masing tertanggal 21 Juli 2023 dan 18 Maret 2023 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Tingkat diskonto	6,75%	7,25%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2022	2022
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir ("BFPT") dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti ("BPP") dan Pesangon Meninggal Dunia ("Pesangon MD"). Pesangon MD diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia dengan besaran sebanyak 12 kali gaji terakhir.

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, pada laporan masing-masing tertanggal 21 Juli 2023 dan 18 Maret 2023 yang dilakukan oleh KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Tingkat diskonto	6,25%	6,75%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2019	2019

d. Imbalan khusus masa kerja

Perusahaan memberikan Tunjangan Khusus Masa Kerja kepada karyawan dengan kriteria karyawan yang diangkat sebelum 1 Juli 2002 dan memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun serta berakhir hubungan kerja setelah 19 September 2019. Jumlah tercatat liabilitas imbalan khusus masa kerja pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1 miliar dan Rp1 miliar. Beban tunjangan masa kerja yang dibebankan adalah sebesar Rp1 miliar dan Rp1 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

e. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 mengenai Ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat liabilitas tambahan ini pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.006 miliar dan Rp928 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp84 miliar dan Rp83 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022.

f. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat						
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya	Imbalan pasca kerja UUCK (Telkom)
	Manfaat pasti	Manfaat tambahan	Unfunded				
30 Juni 2023							
Dalam 10 tahun kedepan	21.486	40	667	5.111	8.308	310	67
Dalam 10-20 tahun	16.268	31	233	11.178	12.929	126	414
Dalam 20-30 tahun	10.089	17	454	7.827	11.845	81	526
Dalam 30-40 tahun	3.963	6	75	473	5.205	4	59
Dalam 40-50 tahun	800	1	-	-	876	-	-
Dalam 50-60 tahun	66	-	-	-	51	-	-
Dalam 60-70 tahun	1	-	-	-	5	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	1	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	8,73 tahun	8,73 tahun	5,73 tahun	9,45 tahun	12,59 tahun	4,67 tahun	11,58 tahun
31 Desember 2022							
Dalam 10 tahun kedepan	21.232	40	705	5.111	8.092	324	59
Dalam 10-20 tahun	16.485	31	229	11.178	12.746	123	414
Dalam 20-30 tahun	10.414	18	430	7.827	12.019	83	497
Dalam 30-40 tahun	4.209	6	96	473	5.491	6	80
Dalam 40-50 tahun	882	1	-	-	970	-	-
Dalam 50-60 tahun	77	-	-	-	59	-	-
Dalam 60-70 tahun	2	-	-	-	6	-	-
Dalam 70-80 tahun	-	-	-	-	1	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	8,48 tahun	8,48 tahun	5,52 tahun	9,45 tahun	12,40 tahun	4,62 tahun	11,69 tahun

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

30. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

g. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak atas liabilitas manfaat pasti pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Tingkat gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
Sensitivitas				
30 Juni 2023				
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.312)	2.759	251	(240)
Tidak didanai	(25)	28	28	(25)
Telkomsel	(452)	516	563	(501)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.548)	1.869	1.852	(1.563)
Imbalan pasca kerja lainnya	(12)	13	3	(3)
Imbalan pasca kerja UUCK (Telkom)	(10)	11	32	(28)
31 Desember 2022				
Didanai:				
Manfaat pasti	(1.948)	2.291	268	255
Tidak didanai	(24)	27	29	(27)
Telkomsel	(430)	491	536	(477)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(1.413)	1.703	1.629	1.380
Imbalan pasca kerja lainnya	(12)	13	-	-
Imbalan pasca kerja UUCK (Telkom)	(8)	10	27	(24)

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir tahun pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut di atas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal eksternal lain yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

31. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”)

Telkomsel dan Telkomsat memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan *Long Service Leaves* (“LSL”). LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sebesar Rp1.111 miliar dan Rp1.031 miliar masing-masing pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp142 miliar dan Rp87 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (Catatan 24).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sependengali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
Bank milik negara BNI	Entitas sependengali Entitas sependengali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BRI	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
PT Garuda Indonesia (Persero) ("Garuda Indonesia")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan beban listrik
Bahana TCW	Entitas sependengali	Reksa dana
Sarana Multi Infrastruktur	Entitas sependengali	Pinjaman lainnya dan biaya pendanaan
Omni Inovasi Indonesia	Entitas asosiasi	Distribusi kartu SIM dan voucher prabayar
Finarya	Entitas asosiasi	Beban pemasaran dan distribusi kartu SIM dan voucher prabayar
Padi UMKM	Entitas berelasi lainnya	Beban jasa operasional dan pemeliharaan, beban pencairan piutang, beban pelatihan, beban pengamanan internal, beban pengembangan dan penelitian, beban cetak dan <i>printing</i> , beban rapat, beban umum dan administrasi lainnya, beban promosi, beban iklan, beban <i>fee</i> penjualan, beban <i>customer education</i> , dan beban pemasaran
Direksi	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Komisaris	Personil pengawas	Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, Grup mencatat peningkatan (penurunan) atas kerugian penurunan nilai piutang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp305 miliar dan Rp(57) miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi

	2023		2022	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Pendapatan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	79	0,11	31	0,04
Entitas sependengali				
Indosat				
Pertamina	808	1,10	576	0,80
BNI	386	0,53	400	0,56
Garuda Indonesia	288	0,39	265	0,37
BRI	162	0,22	40	0,06
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	122	0,17	90	0,13
Sub-jumlah	637	0,87	947	1,31
Sub-jumlah	2.403	3,28	2.318	3,23
Entitas berelasi lainnya	18	0,02	17	0,02
Entitas asosiasi	4	0,01	6	0,01
Jumlah	2.504	3,42	2.372	3,30
Beban				
Entitas sependengali				
PLN	1.289	2,53	1.214	2,45
Indosat	270	0,53	268	0,54
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	266	0,52	260	0,53
Sub-jumlah	1.825	3,58	1.742	3,52
Entitas berelasi lainnya				
Padi UMKM	296	0,58	293	0,59
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 miliar)	31	0,06	85	0,17
Sub-jumlah	327	0,64	378	0,76
Entitas asosiasi	63	0,12	88	0,18
Jumlah	2.215	4,34	2.208	4,46
Penghasilan pendanaan				
Entitas sependengali				
Bank milik negara	152	28,90	266	60,32
Jumlah	152	28,90	266	60,32
Biaya pendanaan				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	3	0,13	6	0,31
Entitas sependengali				
Bank milik negara	566	25,21	459	23,50
Sarana Multi Infrastruktur	47	2,09	60	3,07
Jumlah	616	27,43	525	26,88

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2023		2022	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
Pembelian aset tetap				
Entitas sepengendali	25	0,17	62	0,46
Jumlah	25	0,17	62	0,46

	2023		2022	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
Distribusi kartu SIM dan voucer				
Entitas asosiasi				
Omni Inovasi Indonesia	465	0,63	506	0,70
Finarya	87	0,12	-	-
Jumlah	552	0,75	506	0,70

c. Saldo dengan pihak berelasi

	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
Kas dan setara kas (Catatan 3)	29.950	10,31	23.328	8,48
Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	465	0,16	400	0,15
Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	1.763	0,61	1.620	0,59
Aset kontrak				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	23	0,01	24	0,01
Entitas sepengendali	256	0,09	248	0,09
Entitas asosiasi	1	0,00	1	0,00
Entitas berelasi lainnya	1	0,00	1	0,00
Jumlah	281	0,10	274	0,10
Aset lancar lainnya	52	0,02	98	0,04
Aset tidak lancar lainnya	8	0,00	15	0,01

	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
Utang usaha (Catatan 15)				
Pemegang saham utama				
Menteri Keuangan	0	0,00	0	0,00
Entitas sepengendali				
BUMN	179	0,12	197	0,16
Indosat	237	0,16	140	0,11
Lain-lain	32	0,02	37	0,03
Sub-jumlah	448	0,30	374	0,30
Entitas berelasi lainnya	85	0,06	57	0,05
Jumlah	533	0,36	431	0,35

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Saldo akun dengan pihak berelasi (lanjutan)

	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
Beban yang masih harus dibayar				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	1	0,00	1	0,00
Entitas sependengali				
BUMN	48	0,03	57	0,05
Bank milik negara	70	0,05	74	0,06
Lain-lain	1	0,00	2	0,00
Sub-jumlah	119	0,08	133	0,11
Jumlah	120	0,08	134	0,11
Liabilitas kontrak				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	20	0,01	34	0,03
Entitas sependengali				
BUMN	190	0,13	170	0,13
Lain-lain	0	0,00	0	0,00
Sub-jumlah	190	0,13	170	0,13
Entitas asosiasi	5	0,00	2	0,00
Entitas berelasi lainnya	1	0,00	3	0,00
Jumlah	216	0,14	209	0,16
Deposit pada pelanggan	19	0,01	19	0,02
Utang bank jangka pendek (Catatan 18)	10.795	7,19	4.462	3,54
Pinjaman penerusan (Catatan 19a)	134	0,09	209	0,17
Utang bank jangka panjang (Catatan 19c)	13.841	9,22	11.284	8,96
Pinjaman lainnya (Catatan 19d)	843	0,56	1.314	1,04

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 19a).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("Public Switched Telephone Network" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat *Multimedia Mobile* serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

ii. Indosat (lanjutan)

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat, Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif di tahun berjalan dan berlaku selanjutnya sampai ada berita acara kesepakatan baru.

Pada tanggal 18 Desember 2017, Perusahaan dan Indosat menandatangani amendemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh ("SLJJ"), dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amendemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"). Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

iii. Lain-lain

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Lintasarta untuk penggunaan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi sirkit langganan Perusahaan.

e. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2023		2022	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Direksi	237	0,46%	230	0,46%
Dewan Komisaris	97	0,19%	89	0,18%

Jumlah yang disajikan pada tabel di atas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Penyesuaian dan eliminasi:

a. Rekonsiliasi pendapatan:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jumlah pendapatan segmen	98.616	95.362
Pendapatan dari segmen non-operasi lainnya	397	378
Eliminasi antarsegmen	<u>(25.535)</u>	<u>(23.757)</u>
Pendapatan konsolidasi	<u>73.478</u>	<u>71.983</u>

b. Rekonsiliasi hasil segmen:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jumlah hasil segmen	23.062	22.517
Rugi usaha dari segmen non-operasi lainnya	(896)	(906)
Penyesuaian dan eliminasi antarsegmen	853	1.325
Penghasilan pendanaan	526	441
Biaya pendanaan	(2.245)	(1.953)
Bagian laba investasi jangka panjang pada entitas asosiasi	<u>2</u>	<u>5</u>
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasi	<u>21.302</u>	<u>21.429</u>

c. Rekonsiliasi pembelian barang modal:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jumlah pembelian barang modal segmen	(14.970)	(13.460)
Pembelian barang modal dari segmen non-operasi lainnya	<u>(70)</u>	<u>(35)</u>
Pembelian barang modal konsolidasi	<u>(15.040)</u>	<u>(13.495)</u>

d. Rekonsiliasi penyusutan dan amortisasi:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jumlah penyusutan dan amortisasi segmen	(18.269)	(19.120)
Penyusutan dan amortisasi dari segmen non-operasi lainnya	(128)	(133)
Penyesuaian dan eliminasi antarsegmen	<u>2.449</u>	<u>2.267</u>
Penyusutan dan amortisasi konsolidasi	<u>(15.948)</u>	<u>(16.986)</u>

e. Rekonsiliasi provisi diakui selama periode berjalan:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jumlah provisi diakui segmen	(819)	(704)
Provisi diakui selama periode berjalan dari segmen non-operasi lainnya	(1)	(7)
Penyesuaian dan eliminasi antarsegmen	<u>17</u>	<u>15</u>
Provisi yang diakui selama periode berjalan konsolidasian	<u>(803)</u>	<u>(696)</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi geografis:

	2023	2022
Pendapatan eksternal		
Indonesia	69.607	69.573
Luar negeri	3.871	2.410
Jumlah	73.478	71.983

Informasi terkait pendapatan di atas didasarkan pada lokasi pelanggan.

Tidak terdapat pendapatan dari pelanggan utama yang melebihi 10% dari total pendapatan pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022.

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	180.684	178.424
Luar negeri	2.892	3.207
Jumlah	183.576	181.631

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

34. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur, dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 5/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang "Penyelenggaraan Telekomunikasi". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- i. Biaya aktivasi
- ii. Biaya berlangganan bulanan
- iii. Biaya penggunaan, dan
- iv. Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 31 Maret 2021, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 5/2021 yang memberikan pedoman penetapan tarif selular dengan formula yang terdiri dari biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan ritel.

Berdasarkan peraturan Menkominfo No. 5/2021, tarif selular untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang terhubung melalui jaringan selular bergerak terdiri dari:

- i. Tarif jasa teleponi dasar
- ii. Tarif jelajah, dan/atau
- iii. Tarif jasa multimedia

dengan struktur tarif sebagai berikut:

- i. Biaya aktivasi
- ii. Biaya berlangganan bulanan, dan/atau
- iii. Biaya penggunaan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

34. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/I/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Pada tahun 2008 Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Indonesia menerbitkan peraturan No. 115 tahun 2008 yang mengatur tentang Perjanjian Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Tarif Layanan Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan yang Dimiliki oleh Penyedia Layanan Sewa Jaringan Dominan sesuai dengan usulan Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan peraturan Menkominfo No. 5/2021, Pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur dan perhitungan tarif untuk jasa yang berhubungan dengan sewa jaringan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

35. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 30 Juni 2023, jumlah ikatan pembelian barang modal adalah sebesar Rp9.024 miliar dan US\$240 juta.

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel dan PT Phincon	12 September 2019 - 12 September 2024	Perjanjian dan Pengadaan <i>Development and Rollout Agreement ("DRA")</i> dan <i>Technical Support Agreement ("TSA")</i> <i>Customer Relationship Management ("CRM") Solution System Integrator</i>
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, PT Huawei Tech Investment, dan PT ZTE Indonesia	1 Februari 2021 - 31 Januari 2024	Perjanjian Pengadaan <i>Radio Ultimate Solution ("ROA")</i> dan <i>TSA</i>
Perusahaan dan PT Mastersystem Infotama	3 Juni 2021 - 27 September 2023	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Ekspan IP <i>Backbone Platform Cisco</i>
Telkomsel, PT Sempurna Global Pratama, PT Lintas Teknologi Indonesia, dan PT Ericsson Indonesia	1 September 2021 - 1 September 2024	Perjanjian Pengadaan <i>Next Generation of Gateway GPRS Support Node ("GGSN") (Virtualized EPC)</i>
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company, dan PT Application Solutions	8 Oktober 2021 - 8 Oktober 2024	Perjanjian <i>Online Charging System ("OCS")</i> dan <i>Service Control Points ("SCP") System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Oktober 2021 - 8 Oktober 2024	Perjanjian <i>TSA</i> untuk <i>OCS</i> dan <i>SCP</i>
Telkomsat dan Thales Alenia Space France ("TAS")	28 Oktober 2021 - 27 Oktober 2037	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Satelit HTS 113BT
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	13 Februari 2022 - 12 Februari 2025	Perjanjian Pengadaan <i>CS Core Solution ROA</i> dan <i>TSA</i>
Telkomsel dan PT Lintas Teknologi Indonesia	13 Februari 2022 - 12 Februari 2025	Perjanjian Pengadaan <i>CS Core Solution ROA</i> dan <i>TSA</i>
Telkomsel dan PT Huawei Tech Investment	24 Maret 2022 - 24 Maret 2025	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN</i>
Telkomsat dan Space Exploration Technologies Corporation ("SpaceX")	19 April 2022 - 30 Juni 2025	Perjanjian Pengadaan Jasa Peluncuran Satelit HTS 113BT

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 30 Juni 2023, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan, dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Kreditur</u>	<u>Jumlah fasilitas</u>	<u>Akhir periode fasilitas</u>	<u>Mata uang asal</u>	<u>Fasilitas yang digunakan</u>
BRI	500	14 Maret 2024	Rp	24
BNI	500	31 Maret 2024	Rp	98
Bank Mandiri	500	23 Desember 2023	Rp	109
Jumlah	1.500			231

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

35. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya (lanjutan)

- (ii) Pada tanggal 30 Juni 2023, Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi untuk berbagai macam proyek sebagai berikut:

<u>Kreditur</u>	<u>Jumlah fasilitas</u>	<u>Akhir periode fasilitas</u>	<u>Mata uang asal</u>	<u>Fasilitas yang digunakan</u>
BRI	1.000	25 September 2023	Rp	618
BNI	2.100	11 Desember 2023	Rp	1.432
	3.100			2.050

Fasilitas bank garansi dengan BRI dan BNI sebagian besar untuk *performance bond* dan *surety bond of radio frequency* (Catatan 35c.i)

- (iii) Telin memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta atau setara dengan Rp225 miliar dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui pada tanggal 23 Desember 2022 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$25 juta atau setara dengan Rp375 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 23 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2023, Telin tidak terdapat pinjaman fasilitas bank garansi.

c. Lainnya

(i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menkominfo No. 025/TEL.01.02/2022 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, Menkominfo memberikan hak kepada Telkomsel untuk:

1. Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
2. Layanan telekomunikasi dasar.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016, No. 1896 Tahun 2017, No. 806 Tahun 2019, No. 620 Tahun 2020, No. 178 Tahun 2021 dan No. 479 Tahun 2022, No. 90 Tahun 2023 Telkomsel disyaratkan antara lain hal lain, untuk:

1. Menyerahkan setiap tahunnya *performance bond* sebesar Rp20 miliar dan *surety bond* sebesar Rp617,15 miliar untuk pita frekuensi 2,1 GHz.
2. Mengeluarkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp1,03 triliun untuk pita frekuensi 2,3 GHz.
3. Mengeluarkan *surety bond* setiap tahunnya sebesar Rp360 miliar untuk pita frekuensi 2,3 GHz Blok A dan C.
4. Membayar iuran tahunan Biaya Hak Penyelenggara ("BHP") yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.

Berikut adalah izin penggunaan frekuensi radio pada Telkomsel, atas izin tersebut Telkomsel terutang BHP setiap tahun hingga masa lisensi berakhir:

1. Pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 620 Tahun 2020, terkait dengan perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz, sehingga Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi tahunan pada tahun 2020 sampai 2030.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

35. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berikut adalah izin penggunaan frekuensi radio pada Telkomsel, atas izin tersebut Telkomsel terutang BHP setiap tahun hingga masa lisensi berakhir (lanjutan):

2. Pita frekuensi radio sampai 2,1 GHz

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 191 Tahun 2013, tentang penetapan Perusahaan sebagai pemenang seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,1 GHz pada rentang 1.970 - 1.975 MHz berpasangan dengan 2.160 - 2.165 MHz, Kementerian memberikan izin penggunaan pita frekuensi radio sampai dengan 18 Maret 2023.

Pada tanggal 27 Februari 2023, Menkominfo mengeluarkan Surat Keputusan No. 90 Tahun 2023 untuk memperpanjang lisensi sampai 18 Maret 2033, kemudian dilakukan penataan ulang menjadi frekuensi 1.975 - 1.980 MHz berpasangan dengan 2.165 - 2.170 MHz sesuai Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 509 Tahun 2016, tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 2,1 GHz pada rentang 1.940 - 1.945 MHz berpasangan dengan 2.130 - 2.135 MHz, Menkominfo menyetujui izin perpanjangan kepada Telkomsel sampai dengan 28 Maret 2026. Pada Februari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023 dilakukan penataan ulang menjadi frekuensi 1.970 - 1.975 MHz berpasangan dengan 2.160 - 2.165 MHz.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 806 Tahun 2019 (sebelumnya diatur melalui Surat Keputusan Menkominfo No. 356 Tahun 2018), tentang perpanjangan penetapan pita frekuensi radio 2,1 GHz pada rentang 1.935 - 1.940 MHz berpasangan dengan 2.125 - 2.130 MHz, Menkominfo memberikan izin perpanjangan kepada Telkomsel sampai dengan 30 September 2029. Pada Februari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023 dilakukan penataan ulang menjadi frekuensi 1.960 - 1.970 MHz berpasangan dengan 2.155 - 2.160 MHz.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 479 Tahun 2022, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang lelang atas hak penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz pada rentang 1.975 - 1.980 MHz berpasangan dengan 2.165 - 2.170 MHz terhitung sejak 11 Januari 2023. Pada Februari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 76 Tahun 2023 dilakukan penataan ulang menjadi frekuensi 1.960 - 1.965 MHz berpasangan dengan 2.150 - 2.155 MHz.

3. Pita frekuensi radio sampai 2,3 GHz

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 1896 tahun 2017, tentang penetapan PT Telekomunikasi Selular sebagai pemenang seleksi atas hak penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang 2.300 - 2.330 MHz.

4. Pita frekuensi radio sampai 2,3 GHz Blok A dan C

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 178 tahun 2021, tentang penetapan PT Telekomunikasi Selular atas hak penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang 2.300 - 2.390 MHz, Telkomsel diharuskan membayar BHP untuk blok frekuensi A dan C sampai dengan 2030. Pada September 2021, frekuensi tersebut dilakukan penataan ulang menjadi frekuensi 2.330 - 2.340 MHz untuk Blok A dan 2.340 - 2.350 MHz untuk Blok C.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

35. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berikut adalah izin penggunaan frekuensi radio pada Telkomsel, atas izin tersebut Telkomsel terutang BHP setiap tahun hingga masa lisensi berakhir (lanjutan):

4. Pita frekuensi radio sampai 2,3 GHz Blok A dan C (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 487 Tahun 2022, Telkomsel mendapat pengalihan hak penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz dari PT Berca Hardayaperkasa sejak 18 November 2022. Pada Februari 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 92 Tahun 2023 dilakukan penataan ulang menjadi frekuensi 2.340 - 2.355 MHz dan 2.330 - 2.360 MHz pada area tertentu.

Pada April 2023, Telkomsel menerima Surat Keputusan Menkominfo No. 188 Tahun 2023 yang memberikan persetujuan kepada Telkomsel untuk mengalihkan sebagian hak penggunaan spektrum frekuensi radio 2,3 GHz dari hasil Surat Keputusan Menkominfo No. 487 Tahun 2022 kepada PT Smartfren Telecom Tbk.

(ii) Perjanjian kerjasama spektrum frekuensi radio

Menkominfo memberikan persetujuan atas kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Telkomsel dan PT Kereta Cepat Indonesia China ("KCIC") melalui Surat Keputusan No.B-171/M.KOMINFO/SP.01.01/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 mengenai Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada rentang 891-895 MHz berpasangan dengan 936-40 MHz, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Desember 2030.

Sebagai akibat dari perjanjian ini, KCIC akan membayar sejumlah kompensasi kepada Telkomsel yaitu kompensasi biaya penggunaan tahunan sebesar Rp878 miliar per tahun, biaya jaringan pengganti sebesar Rp1.250 miliar, serta biaya operasional dan perawatan tambahan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, Telkomsel telah mengakui angsuran pertama untuk biaya jaringan pengganti dan biaya penggunaan tahunan masing-masing sebesar Rp937 miliar dan Rp99 miliar.

(iii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2023 hingga 2032. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Kurang dari 1 tahun	2.836	2.582
1-5 tahun	9.315	8.354
Lebih dari 5 tahun	5.692	5.107
Jumlah	<u>17.843</u>	<u>16.043</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

35. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iv) KPU

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Mitratel pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI") (sekarang Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI")) sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tahun 2015, program tersebut dihentikan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terkait penyelesaian dari sisa piutang atas penyelenggaraan program tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No. 792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BAKTI untuk membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp218 miliar, dan sampai penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini Telkomsel telah menerima pembayaran dari BAKTI sebesar Rp91 miliar (sebelum pajak) dan sisa kompensasi masih belum dibayarkan.

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang menggantikan peraturan sebelumnya terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 827/KOMINFO/BAKTI.31/KS.1/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 BAKTI memberikan kepada Telkomsel sebagai mitra kerjasama operasi ("KSO") untuk delapan paket KSO, yang meliputi Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Tengah, Papua Tengah Utara, dan Papua Timur Selatan untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2031.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	312,21	5,72	14,52	4.904
Aset keuangan lancar lainnya	28,36	-	0,01	426
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,14	-	-	2
Pihak ketiga	98,13	-	10,16	1.627
Aset kontrak	27,88	-	-	419
Piutang lain-lain	0,85	-	1,04	28
Aset lancar lainnya	0,81	-	0,46	19
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	399,72	-	9,09	6.129
Aset tidak lancar lainnya	0,48	-	0,54	15
Jumlah aset	<u>868,58</u>	<u>5,72</u>	<u>35,82</u>	<u>13.569</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,03)	-	-	(0)
Pihak ketiga	(143,62)	(73,50)	(2,71)	(2.205)
Utang lain-lain	(1,05)	-	(1,53)	(40)
Beban yang masih harus dibayar	(35,04)	(3,91)	(2,10)	(557)
Uang muka pelanggan	(3,11)	-	(0,07)	(47)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(15,27)	(767,90)	(4,82)	(382)
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	(17,06)	(383,95)	(27,98)	(717)
Liabilitas lainnya	(2,00)	-	(3,46)	(38)
Jumlah liabilitas	<u>(217,18)</u>	<u>(1.229,26)</u>	<u>(42,67)</u>	<u>(3.986)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>651,40</u>	<u>(1.223,54)</u>	<u>(6,85)</u>	<u>9.583</u>

	31 Desember 2022			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	261,09	5,74	13,60	4.298
Aset keuangan lancar lainnya	27,06	-	0,02	427
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0,47	-	-	7
Pihak ketiga	86,06	-	8,24	1.481
Aset kontrak	30,91	-	-	486
Piutang lain-lain	0,92	-	1,11	32
Aset lancar lainnya	0,30	-	0,46	13
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	372,84	-	6,22	5.907
Aset tidak lancar lainnya	0,43	-	0,55	17
Jumlah aset	<u>780,08</u>	<u>5,74</u>	<u>30,20</u>	<u>12.668</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,13)	-	-	(2)
Pihak ketiga	(104,25)	(25,34)	(5,82)	(1.728)
Utang lain-lain	(1,58)	-	(2,93)	(70)
Biaya yang masih harus dibayar	(39,41)	(5,21)	(2,31)	(657)
Uang muka pelanggan	(2,39)	-	(0,11)	(38)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(15,78)	(767,90)	(4,72)	(413)
Pinjaman jangka panjang dan pinjaman lainnya	(24,75)	(767,90)	(30,60)	(958)
Liabilitas lainnya	(2,00)	-	-	(33)
Jumlah liabilitas	<u>(190,29)</u>	<u>(1.566,35)</u>	<u>(46,49)</u>	<u>(3.899)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>589,79</u>	<u>(1.560,61)</u>	<u>(16,29)</u>	<u>8.769</u>

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lain-lain disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

i. Klasifikasi

(a) Aset keuangan

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas dan setara kas	40.521	31.947
Aset keuangan lancar lainnya	1.029	1.268
Piutang usaha	10.151	8.634
Piutang lain-lain	1.419	245
Aset tidak lancar lainnya	164	186
FVTPL		
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	9.087	8.508
Aset keuangan lancar lainnya	373	81
FVTOCI		
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	22	22
Jumlah aset keuangan	<u>62.766</u>	<u>50.891</u>

(b) Liabilitas keuangan

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang usaha	15.370	18.457
Utang lain-lain	16.075	463
Beban yang masih harus dibayar	13.717	15.445
Deposit pada pelanggan	35	44
Utang bank jangka pendek	15.129	8.191
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	134	209
Obligasi	4.793	4.793
Utang bank jangka panjang	34.959	29.873
Pinjaman lainnya	843	1.314
Liabilitas sewa	18.492	18.661
Jumlah liabilitas keuangan	<u>119.547</u>	<u>97.450</u>

ii. Nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan:

	30 Juni 2023	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
				Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
FVTPL						
Aset keuangan lancar lainnya		373	373	373	-	-
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan		9.087	9.087	2.615	-	6.472
FVTOCI						
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan		22	22	-	-	22
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						
Pinjaman:						
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)		134	132	-	-	132
Obligasi		4.793	5.697	5.697	-	-
Utang bank jangka panjang		34.959	34.649	-	-	34.649
Pinjaman lainnya		843	840	-	-	840
Liabilitas sewa		18.492	18.492	-	-	18.492
Jumlah		<u>68.703</u>	<u>69.292</u>	<u>8.685</u>	<u>-</u>	<u>60.607</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
 (Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai buku dan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, selain dari itu nilai wajar instrumen keuangan dipertimbangkan mendekati nilai buku sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan (lanjutan):

	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
31 Desember 2022					
FVTPL					
Aset keuangan lancar lainnya	81	81	81	-	-
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	8.508	8.508	2.172	-	6.336
FVTOCI					
Investasi jangka panjang pada instrumen keuangan	22	22	-	-	22
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					
Pinjaman:					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	209	207	-	-	207
Obligasi	4.793	5.614	5.614	-	-
Utang bank jangka panjang	29.873	29.860	-	-	29.860
Pinjaman lainnya	1.314	1.311	-	-	1.311
Liabilitas sewa	18.661	18.661	-	-	18.661
Liabilitas lainnya	170	170	-	-	170
Jumlah	63.631	64.434	7.867	-	56.567

Per 31 Desember 2022, terdapat perpindahan hirarki nilai wajar atas aset keuangan dari level 2 dan level 3 ke level 1 dengan pertimbangan terdapat *quoted price* dalam keadaan pasar aktif untuk aset identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran. Sehingga aset keuangan tersebut dapat dikategorisasikan sebagai level 1. Aset keuangan tersebut berupa investasi jangka panjang dalam bentuk saham pada GOTO sebesar Rp2.159 miliar dan pada PT Global Sukses Solusi Tbk. sebesar Rp13 miliar.

Kerugian atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp(93) miliar.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah:

	<u>30 Juni 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Saldo awal	6.358	4.762
Laba (rugi) yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(93)	282
Pembelian/penambahan	229	1.338
Penjualan/pengurangan	-	(24)
Saldo akhir	6.494	6.358

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

iii. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (a) Nilai wajar pada laporan laba rugi, terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar dari obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (b) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgemental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- (a) Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- (b) Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga pasar, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh Unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,87	0,01	0,78	0,01
Liabilitas keuangan	(0,22)	(1,23)	(0,19)	(1,57)
Eksposur bersih	0,65	(1,22)	0,59	(1,56)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 30 Juni 2023 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	Ekuitas/ laba (rugi)
30 Juni 2023	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	98
Yen Jepang (penguatan 5%)	(6)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 30 Juni 2023 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

ii. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Kinerja aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 18 dan 19). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Pinjaman bunga tetap	(41.972)	(27.767)
Pinjaman bunga mengambang	(32.378)	(35.274)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 30 Juni 2023, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp81 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

iv. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Kas dan setara kas	40.521	31.947
Aset keuangan lancar lainnya	1.402	1.349
Piutang usaha	10.151	8.634
Piutang lain-lain	1.419	245
Aset tidak lancar lainnya	164	186
Jumlah	53.657	42.361

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan. Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup.

Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit di mana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 3,33% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2023 (31 Desember 2022: 4,33%).

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, di mana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

37. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

v. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio lancar dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2023	2024	2025	2026	2027 dan selanjutnya
30 Juni 2023							
Utang usaha	15.370	(15.370)	(15.370)	-	-	-	-
Utang lain-lain	16.075	(16.075)	(16.075)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	13.717	(13.717)	(13.717)	-	-	-	-
Deposit pada pelanggan	35	(35)	(35)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank jangka pendek	15.129	(15.129)	(15.129)	-	-	-	-
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	134	(137)	(96)	(41)	-	-	-
Obligasi	4.793	(9.842)	(510)	(255)	(2.574)	(293)	(6.210)
Utang bank jangka panjang	34.959	(41.343)	(15.506)	(4.180)	(7.468)	(5.754)	(8.435)
Pinjaman lainnya	843	(875)	(875)	-	-	-	-
Liabilitas sewa	18.492	(21.116)	(5.953)	(798)	(2.957)	(2.565)	(8.843)
Jumlah	119.547	(133.639)	(83.266)	(5.274)	(12.999)	(8.612)	(23.488)

	Nilai buku tercatat	Arus kas wajib	2023	2024	2025	2026	2027 dan selanjutnya
31 Desember 2022							
Utang usaha	18.457	(18.457)	(18.457)	-	-	-	-
Utang lain-lain	463	(463)	(463)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	15.445	(15.445)	(15.445)	-	-	-	-
Deposit pada pelanggan	44	(44)	(44)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank jangka pendek	8.191	(8.191)	(8.191)	-	-	-	-
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	209	(216)	(123)	(93)	-	-	-
Obligasi	4.793	(10.096)	(509)	(510)	(2.574)	(293)	(6.210)
Utang bank jangka panjang	29.873	(36.301)	(10.020)	(8.346)	(6.871)	(4.874)	(6.190)
Pinjaman lainnya	1.314	(1.394)	(1.027)	(367)	-	-	-
Liabilitas sewa	18.661	(22.053)	(5.893)	(4.545)	(2.766)	(2.258)	(6.591)
Liabilitas lainnya	170	(196)	(20)	(44)	(44)	(44)	(44)
Jumlah	97.620	(112.856)	(60.192)	(13.905)	(12.255)	(7.469)	(19.035)

Perbedaan antara nilai buku tercatat dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

38. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023		31 Desember 2022	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	15.129	7,63%	8.191	4,26%
Utang jangka panjang	59.221	29,88%	54.850	28,52%
Total utang	74.350	37,51%	63.041	32,78%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	123.845	62,49%	129.258	67,22%
Jumlah	198.195	100,00%	192.299	100,00%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau di bawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Jumlah utang dengan bunga	74.350	63.041
Dikurangi: kas dan setara kas	(40.521)	(31.947)
Utang bersih	33.829	31.094
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	123.845	129.258
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	27,32%	24,06%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 19, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh pemberi pinjaman. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022, Grup sudah memenuhi beberapa persyaratan modal yang telah diberlakukan secara eksternal.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 30 Juni 2023 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (tidak diaudit)
(Angka dalam tabel disajikan dalam miliaran Rupiah, kecuali disajikan lain)

39. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

- a. Aktivitas non-kas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	3.145	2.814
Kapitalisasi bunga	63	25
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa (Catatan 12)	4.755	1.406
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	380	444

- b. Perubahan dalam kenaikan liabilitas dari kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2023	Arus kas	Perubahan non-tunai			30 Juni 2023
			Perubahan valuta asing	Sewa baru	Perubahan lainnya	
Utang bank jangka pendek	8.191	6.938	-	-	-	15.129
Pinjaman penerusan (<i>two step loans</i>)	209	(65)	(10)	-	-	134
Obligasi	4.793	-	-	-	-	4.793
Utang bank jangka panjang	29.873	5.098	(26)	-	14	34.959
Pinjaman lainnya	1.314	(472)	-	-	1	843
Liabilitas sewa	18.661	(3.113)	(30)	4.755	(1.781)	18.492
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	63.041	8.386	(66)	4.755	(1.766)	74.350

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- a. Pada tanggal 7 Juli 2023 dan 21 Juli 2023, Telkomsel melunasi sebagian pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka menengah kepada Mandiri, BSI, BNI, BCA dan BJB sebesar Rp6.500 miliar.
- b. Pada tanggal 20 Juli 2023, Telkomsel melakukan penarikan pinjaman dari BSI sebesar Rp500 miliar.
- c. Pada tanggal 26 Juli 2023, Mitratel melakukan akuisisi 90 menara telekomunikasi milik PT Triview Geospatial Mandiri senilai Rp121 miliar.
- d. Pada tanggal 28 Juli 2023, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman dari Bank HSBC Indonesia sebesar Rp800 miliar.